

ANALISIS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2021



**PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN**

ANALISIS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2021

**Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Kementerian Pertanian
2021**

ANALISIS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2021 Volume 1 Tahun 2021

Ukuran Buku : 10,12 inci x 7,17 inci (B5)

Jumlah Halaman : 79 halaman

Penasehat :

Roby Darmawan, M. Eng

Penyunting :

Dr. Anna Astrid Susanti, M.Si
Sri Wahyuningsih, S.Si

Naskah :

Ir. Sabarella, M.Si
Ir. Wieta B Komalasari, M.Si
Megawati Manurung, SP
Sehusman, SP
Yani Supriyati, SE
Rinawati, SE
Karlina Seran, S.Si
Maidiah Dwi Naruri Saida, S.Si

Design Sampul :

Rinawati, SE

Diterbitkan oleh :

**Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Kementerian Pertanian
2021**

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga publikasi "Analisis Ketahanan Pangan Tahun 2021" telah diselesaikan. Publikasi ini merupakan salah satu output dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dalam mengemban visi dan misinya dalam mempublikasikan data sektor pertanian maupun hasil analisisnya.

Publikasi Analisis Ketahanan Pangan Tahun 2021 disusun berdasarkan data dan informasi data sekunder yang bersumber dari instansi terkait baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog serta dari *website* GFSI (*Global Food Security Index*) dan *Food and Agriculture Organization (FAO)*.

Penyajian analisis meliputi keragaan penyusun aspek ketahanan pangan diantaranya pola panen dan produksi padi serta provinsi sentra produksi komoditas pangan, stok pangan, konsumsi, pengeluaran untuk konsumsi, kemiskinan, ketidakcukupan pangan dan indikator lainnya selama 3 sampai 5 tahun terakhir serta dilengkapi dengan analisis *import dependency ratio* (IDR) dan *self sufficiency ratio* (SSR) komoditas pangan, analisis neraca penyediaan dan kebutuhan pangan, serta analisis ketahanan pangan lainnya.

Publikasi ini disajikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dapat diakses melalui *website* Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian yaitu <http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/publikasi/buletin>. Dengan diterbitkannya publikasi ini diharapkan para pembaca dapat memperoleh gambaran perkembangan ketahanan pangan secara lengkap.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan perbaikan publikasi berikutnya.

Jakarta, November 2021
Kepala Pusat Data dan
Sistem Informasi Pertanian,



Roby Darmawan, M.Eng

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
BAB II. METODOLOGI	3
2.1. Sumber Data dan Informasi	3
2.2. Metode Analisis	3
BAB III. GAMBARAN UMUM ASPEK KETAHANAN PANGAN	5
3.1. Aspek Ketersediaan Pangan.....	5
3.2. Aspek Keterjangkauan Pangan.....	19
3.3. Aspek Kualitas dan Keamanan Pangan.....	40
BAB IV. ANALISIS KETAHANAN PANGAN.....	47
4.1. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Pangan	47
4.2. Indeks Ketahanan Pangan	56
4.3. <i>Global Food Security Index</i> (GFSI)	62
BAB V. KESIMPULAN	73
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 3.1.1.a. Provinsi Sentra Produksi Beberapa Komoditas Pangan Utama, 2020	9
Tabel 3.1.1.b. Provinsi Sentra Produksi Beberapa Komoditas Pangan Utama, 2020	9
Tabel 3.1.1.c. Provinsi Sentra Produksi Beberapa Komoditas Pangan Utama, 2020	10
Tabel 3.1.2. Sebaran Stok Pangan Lainnya, Oktober 2021	16
Tabel 3.1.3. <i>Import Dependency Ratio</i> (IDR) dan <i>Self Sufficiency Ratio</i> (SSR) Beras, 2018 – 2020	17
Tabel 3.1.4. <i>Import Dependency Ratio</i> (IDR) dan <i>Self Sufficiency Ratio</i> (SSR) Pangan Lainnya, 2018 – 2020	19
Tabel 3.2.1. Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Bahan Makanan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2016 – 2020	21
Tabel 3.2.2. Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Bahan Makanan di Wilayah Perkotaan, 2016 – 2020	23
Tabel 3.2.3. Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Bahan Makanan di Wilayah Perdesaan, 2016 – 2020	24
Tabel 3.2.4. Tingkat Partisipasi Beberapa Bahan Makanan, 2016 – 2020 ..	27
Tabel 3.2.5. Pengeluaran untuk Makanan menurut Provinsi, 2016 – 2020 .	31
Tabel 3.2.6. Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi, 2016 – 2020	33
Tabel 3.2.7. Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi, 2016 – 2020 .	34
Tabel 3.2.8. Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan menurut Provinsi, 2016 – 2020	36
Tabel 3.2.9. Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaan menurut Provinsi, 2016 – 2020	38
Tabel 3.3.1. Konsumsi Energi dan Protein Penduduk Indonesia, 2018 – 2020	40
Tabel 3.3.2. Konsumsi Energi dan Skor Pola Pangan Harapan Indonesia Menurut Kelompok Pangan, 2018 – 2020	42
Tabel 3.3.3. Prevelansi Ketidacukupan Konsumsi Pangan per Provinsi, 2018 – 2020	44

Tabel 4.1.1.	Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Beras, Januari – Desember 2021	48
Tabel 4.1.2.	Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Jagung dan Kedelai, Januari – Desember 2021	50
Tabel 4.1.3.	Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Bawang Merah dan Bawang Putih, Januari – Desember 2021	51
Tabel 4.1.4.	Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Cabe Besar dan Cabe Rawit, Januari – Desember 2021	53
Tabel 4.1.5.	Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Gula dan Minyak Goreng, Januari – Desember 2021	54
Tabel 4.1.6.	Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Daging Sapi/Kerbau, Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras, Januari – Desember 2021	55
Tabel 4.2.1.	Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi, 2019 - 2020	57
Tabel 4.2.2.	Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten, 2018 - 2020	60
Tabel 4.2.3.	Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota, 2018 - 2020	61
Tabel 4.3.1.	Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Indonesia berdasarkan <i>Global Food Security Index</i> , 2018 - 2021.....	63
Tabel 4.3.2.	Indeks Ketahanan Pangan Negara di Dunia, 2018 - 2021	65
Tabel 4.3.3.	<i>Global Food Security Index</i> Negara di Dunia, 2021	67
Tabel 4.3.4.	Indeks Ketahanan Pangan Negara di Asia Pasifik, 2018 - 2020	69
Tabel 4.3.5.	<i>Global Food Security Index</i> Negara di Asia Pasifik, 2021	71

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 3.1.1. Pola Panen Padi di Indonesia, 2018 – 2020	6
Gambar 3.1.2. Provinsi Sentra Produksi Padi di Indonesia, 2018 – 2020 ..	7
Gambar 3.1.3. Pengelompokan Provinsi berdasarkan Produksi Padi	8
Gambar 3.1.4. Sebaran Stok Beras, Oktober 2021	12
Gambar 3.1.5. Rata – Rata Sebaran Stok Beras, 2015	13
Gambar 3.1.6. Persentase Sebaran Stok Gabah/Beras di Rumah Tangga BPS, 2015	14
Gambar 3.1.7. Sebaran Stok Beras di Bulog, Januari 2019 s.d Oktober 2021	15
Gambar 3.2.1. Pola Pengeluaran per Kapita Sebulan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2020	20
Gambar 3.2.2. Pola Pengeluaran Bahan Makanan per Kapita Sebulan di Wilayah Perkotaan + Perdesaan, 2020	22
Gambar 3.2.3. Perkembangan Pola Pengeluaran menurut Kelompok Bahan Makanan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2020	25
Gambar 3.2.4. Pola Pengeluaran Bahan Makanan per Kapita Sebulan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2020	26
Gambar 3.2.5. Boxplot Persentase Pengeluaran untuk Makanan menurut Provinsi, 2016 - 2020	29
Gambar 3.2.6. Boxplot Pengeluaran untuk Makanan Provinsi, 2016 - 2020	30
Gambar 3.2.7. Boxplot Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan, Perdesaan dan Total menurut Provinsi, 2016 - 2020	39
Gambar 3.3.1. Rata – Rata Konsumsi Energi dan Protein per Provinsi, 2020	41
Gambar 3.3.2. Perkembangan Kerawanan Pangan Sedang dan Besar (FIES) di Indonesia, 2018 - 2020	45

Gambar 4.1.1.	Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Beras, Januari – Desember 2021	49
Gambar 4.1.2.	Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Cabe Besar, Cabe Rawit, Gula, Minyak Goreng, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras, 2021	52
Gambar 4.2.1.	Boxplot Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi, 2019 - 2020	58
Gambar 4.2.2.	Pengelompokan Provinsi Berdasarkan Skor Indeks Ketahanan Pangan, 2019 - 2020	59
Gambar 4.2.3.	Sepuluh Peringkat Pertama dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten, 2018 - 2020	60
Gambar 4.2.4.	Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota, 2018 - 2020	61
Gambar 4.3.1.	Skor Indeks Ketahanan Pangan Indonesia berdasarkan <i>Global Food Security Index</i> , 2018 - 2021	64
Gambar 4.3.2.	Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Negara di Dunia, 2020 - 2021	66
Gambar 4.3.3.	Pengelompokan Indeks Ketahanan Pangan Global Negara di Asia Pasifik, 2018 - 2021	70

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Ketahanan Pangan No.18 tahun 2012, bahwa ketahanan pangan adalah "kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Ketahanan pangan nasional masih menjadi isu yang penting bagi Indonesia mengingat kecukupan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya meliputi **ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, serta kualitas dan keamanan pangan**. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga sub sistem tersebut.

Produksi dan ketersediaan pangan merupakan kemampuan masyarakat dan negara dalam menyediakan pangan dari produksi domestik maupun dari luar negeri (impor). Ketersediaan pangan yang cukup di tingkat nasional atau wilayah adalah unsur penting dalam membangun ketahanan pangan. Namun demikian ketersediaan pangan yang cukup di tingkat nasional dan provinsi tidak secara otomatis menjamin ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan individu. Pangan dapat tersedia dan diakses secara fisik namun bila sebagian anggota rumah tangga tidak mendapat manfaat secara maksimal karena masalah distribusi pangan, baik jumlah maupun keragaman yang

disebabkan kondisi tubuh tidak dapat menyerap pangan karena sakit maupun penyiapan pangan yang kurang tepat. Untuk mendapatkan gambaran yang komperhensif terkait ketahanan pangan tersebut, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai instansi penyedia data dan informasi di lingkup Kementerian Pertanian, pada tahun 2021 telah melakukan analisis ketahanan pangan yang bersumber dari data sekunder dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai indikator aspek penyusun ketahanan pangan.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya analisis ketahanan pangan adalah untuk melakukan kajian terhadap:

- a. Perkembangan aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan masyarakat Indonesia, 2018 – 2020/2021
- b. Analisis ketahanan pangan dari berbagai indikator baik secara nasional maupun posisi Indonesia dibandingkan negara lainnya.

BAB II. METODOLOGI

2.1. Sumber Data dan Informasi

Analisis ketahanan pangan ini disusun berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari instansi terkait baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog serta dari *website* GFSI (*Global Food Security Index*) dan *Food and Agriculture Organization (FAO)*.

2.2. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan analisis ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

A. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis keragaan diantaranya dengan menampilkan nilai rata-rata pertumbuhan per tahun, rata-rata dan persen kontribusi (*share*) yang mencakup indikator penyusun ketahanan pangan meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas dan keamanan pangan. Indikator yang dimaksud meliputi data produksi, ekspor, impor, stok, harga, konsumsi, pengeluaran, kemiskinan dan lainnya. Penyajian analisis berupa tabel maupun visualisasi grafik/gambar berupa grafik batang, *boxplot*, *pie chart*, histogram dan lainnya.

B. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam analisis ketahanan pangan antara lain :

✓ **Import Dependency Ratio (IDR)**

Import Dependency Ratio (IDR) merupakan formula yang menyediakan informasi ketergantungan suatu negara terhadap impor suatu komoditas. Nilai IDR dihitung berdasarkan definisi yang dibangun oleh FAO (*Food and Agriculture Organization of the United Nations*).

Perhitungan nilai IDR tidak termasuk perubahan stok dikarenakan besarnya stok (baik dari impor maupun produksi domestik) tidak diketahui.

$$\text{IDR} = \frac{\text{Impor}}{(\text{Produksi} + \text{impor} - \text{ekspor})} \times 100$$

✓ **Self Sufficiency Ratio (SSR)**

Nilai SSR menunjukkan besarnya produksi dalam kaitannya dengan kebutuhan dalam negeri. SSR diformulasikan sbb.:

$$\text{SSR} = \frac{\text{Produksi}}{(\text{Produksi} + \text{impor} - \text{ekspor})} \times 100$$

✓ **Neraca Pangan**

Ketersediaan = Stok awal + Produksi

Kebutuhan = (konsumsi per kapita (Susenas) X Jumlah Penduduk) +
Konsumsi di luar rumah tangga + konsumsi lainnya

Neraca Pangan (surplus/defisit) = Ketersediaan - Kebutuhan

BAB III. GAMBARAN UMUM ASPEK KETAHANAN PANGAN

3.1. Aspek Ketersediaan Pangan

Aspek ketersediaan mencakup produksi, stok serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga meskipun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya serta stabil penyediaannya sesuai permintaan dari waktu ke waktu.

3.1.1. Pola Panen dan Produksi

Pemenuhan konsumsi pangan terutama beras, sebagai bahan makanan utama sekaligus sumber nutrisi penting dalam struktur pangan melalui aspek penyediaan menjadi hal yang sangat penting, mengingat jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Padi dibudidayakan hampir di semua provinsi di Indonesia sepanjang tahun tanpa mengenal musim khususnya untuk lahan sawah dengan irigasi yang bagus. Hal ini ditunjukkan dengan pola panen bulanan padi di Indonesia terjadi sepanjang tahun seperti yang tersaji pada Gambar 3.1.1. Berdasarkan data hasil Kerangka Survei Area (KSA) yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2018 sampai 2020, perkembangan luas panen padi di Indonesia tahun 2020 terlihat sedikit menurun 0,19% dibandingkan 2019 menjadi 10,66 juta hektar. Secara umum, puncak panen padi di Indonesia terjadi pada bulan Maret untuk tahun 2018 dan 2019, namun tahun 2020 bergeser pada bulan April. Puncak panen di bulan Maret 2018 lebih tinggi 3,2% dibandingkan 2019 yaitu sebesar 1,77 juta ha. Sementara puncak panen April 2020 lebih tinggi 4,38% dibandingkan Maret 2018 atau menjadi 1,86 juta ha. Selain pada bulan tersebut, puncak panen kedua terjadi pada

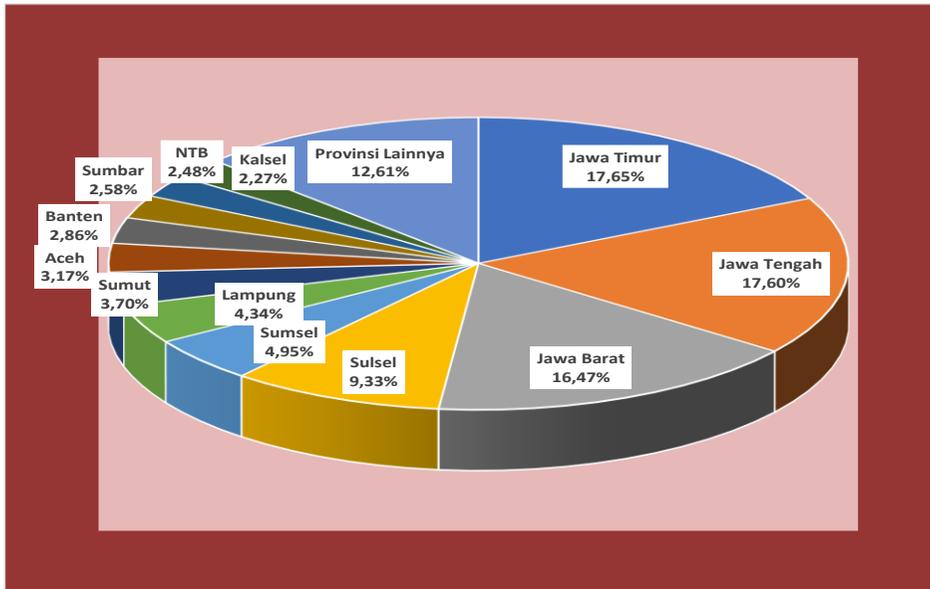
Agustus dan selanjutnya luas panen makin berkurang sampai awal tahun berikutnya (Gambar 3.1.1).



Gambar 3.1.1. Pola Panen Padi di Indonesia, 2018 - 2020

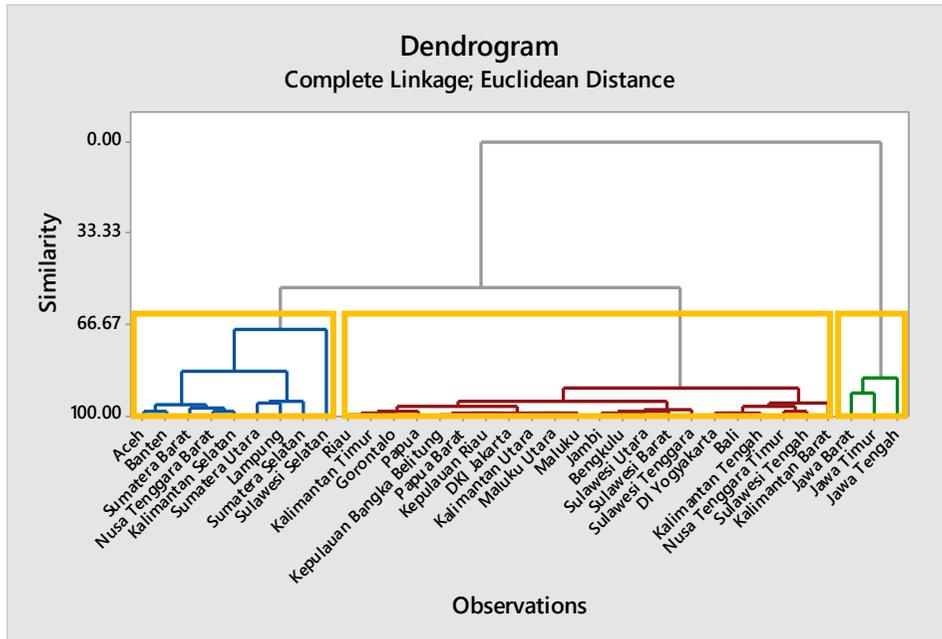
Sejalan dengan luas panen padi, perkembangan produksi padi dalam wujud gabah kering giling (GKG) tahun 2018 sampai 2020 cenderung juga menurun yaitu 59,2 juta ton tahun 2018 kemudian menurun menjadi 54,6 juta ton pada tahun 2019 dan tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 54,65 juta ton. Sekitar 87% produksi padi di Indonesia disumbang oleh 12 provinsi sentra. Provinsi sentra produksi padi didominasi oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 17,65% (setara 9,91 juta ton GKG), 17,60% (9,88 juta ton GKG), 16,47% (9,25 juta ton GKG), Sulawesi Selatan sebesar 9,33% (5,24 juta ton GKG), selanjutnya provinsi Sumatera Selatan (4,95%) dan Lampung (4,34%), sementara provinsi sentra lainnya adalah Sumatera Utara, Aceh, Banten,

Sumatera Barat, NTB dan Kalimantan Selatan dengan kontribusi masing-masing kurang dari 4% (Gambar 3.1.2).



Gambar 3.1.2. Provinsi Sentra Produksi Padi di Indonesia, 2018 - 2020

Bila dilakukan pengelompokan provinsi berdasarkan produksi padi, terdapat 3 kelompok berdasarkan kemiripan produksinya, pada kelompok 1 atau produksi rendah terdapat 22 provinsi dengan produksi 627 ton sampai 1,14 juta ton, berikutnya kelompok 2 atau produksi sedang terdapat 9 provinsi dengan produksi 1,15 juta ton sampai 6,05 juta ton dan kelompok 3 atau produksi tinggi terdapat 3 provinsi dengan produksi antara 9,02 juta ton sampai 13,63 juta ton seperti tersaji pada Gambar 3.1.3.



Gambar 3.1.3. Pengelompokan Provinsi berdasarkan Produksi Padi

Selanjutnya untuk produksi pangan lainnya, tahun 2020 terdapat 15 provinsi sentra share diatas 70% terhadap produksi nasional, bahkan untuk bawang merah mencapai 95,67% dan tebu 97,17% seperti tersaji pada Tabel 3.1.1a dan Tabel 3.1.1b. Sentra produksi komoditas jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar) masih didominasi oleh provinsi di wilayah Jawa yaitu provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, begitu juga komoditas komoditas cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih didominasi provinsi di wilayah Jawa ditambah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana Provinsi NTB untuk komoditas bawang putih cukup besar di tahun 2020 sebesar 30,08%. Sentra produksi tebu disumbang oleh 2 provinsi utama yaitu Jawa Timur dan Lampung secara kumulatif mencapai 80,31%.

Tabel 3.1.1a. Provinsi Sentra Produksi Beberapa Komoditas tanaman Pangan, 2020

No.	Provinsi	Jagung ¹⁾		Kedele ¹⁾		Ubi Kayu ¹⁾		Ubi Jalar ¹⁾	
		Share (%)	2020**)	Share (%)	2020**)	Share (%)	2020**)	Share (%)	2020**)
1	Sumatera Utara	6,52	3.425	1,18	1.020.616	5,45	95.857	6,08	
2	Sumatera Barat	3,00	56	0,02	144.668	0,77	110.843	7,03	
3	Riau	0,15	2.854	0,98	133.384	0,71	7.274	0,46	
4	Sumatera Selatan	3,15	1.083	0,37	149.914	0,80	19.055	1,21	
5	Lampung	10,71	2.287	0,79	6.819.473	36,41	38.691	2,45	
6	Jawa Barat	5,19	101.150	34,80	1.451.065	7,75	454.962	28,85	
7	Jawa Tengah	12,70	43.519	14,97	3.291.933	17,57	139.278	8,83	
8	Jawa Timur	22,66	53.283	18,33	1.973.584	10,54	232.776	14,76	
9	Banten	0,31	710	0,24	65.488	0,35	13.379	0,85	
10	Nusa Tenggara Barat	6,41	33.226	11,43	56.501	0,30	16.405	1,04	
11	Kalimantan Barat	0,88	64	0,02	228.591	1,22	23.337	1,48	
12	Kalimantan Tengah	0,49	104	0,04	68.654	0,37	8.046	0,51	
13	Kalimantan Timur	0,30	82	0,03	59.424	0,32	12.789	0,81	
14	Sulawesi Utara	3,98	17.090	5,88	80.323	0,43	38.483	2,44	
15	Sulawesi Selatan	7,27	3.288	1,13	299.322	1,60	66.716	4,23	
	Provinsi lainnya	16,28	28.412	9,78	2.888.175	15,42	299.237	18,97	
Indonesia		100,00	290.633	100,00	18.731.115	100,00	1.577.128	100,00	
Share Kumulatif 15 Provins		83,72		90,22		84,58		81,03	

Sumber : Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian seluruh Indonesia

Keterangan : 1) Kualitas produksi jagung pipilan kering , kedelai biji kering, ubi kayu dan ubi jalar umbi basah,

***) Produksi Jagung 2020 merupakan angka estimasi dengan kadar air Pipilan Kering sekitar 25%

***) Tahun 2020 produksi kedelai, ubikayu, ubi jalar berdasarkan angka estimasi dari Direktorat Aneka Kacang dan Umbi

Tabel 3.1.1b. Provinsi Sentra Produksi Beberapa Komoditas Sayuran dan Tebu, 2020

No.	Provinsi	Cabe Merah		Cabe Rawit		Bawang Merah		Bawang Putih		Tebu ¹⁾	
		2020	Share (%)	2020	Share (%)	2020	Share (%)	2020	Share (%)	2020*)	Share (%)
1	Sumatera Utara	193.862	15,33	61.160	4,05	29.222	1,61	1.339	1,64	14.317	0,67
2	Sumatera Barat	133.190	10,54	33.356	2,21	153.770	8,47	4.906	6,00	-	-
3	Riau	16.735	1,32	8.627	0,57	263	0,01	0	0,00	-	-
4	Sumatera Selatan	28.497	2,25	11.645	0,77	934	0,05	115	0,14	91.807	4,31
5	Lampung	37.987	3,00	10.558	0,70	2.105	0,12	808	0,99	732.143	34,36
6	Jawa Barat	266.067	21,05	130.838	8,67	164.827	9,08	3.253	3,98	38.150	1,79
7	Jawa Tengah	166.260	13,15	159.099	10,55	611.165	33,66	33.304	40,71	154.803	7,26
8	Jawa Timur	99.110	7,84	684.943	45,41	454.584	25,04	5.898	7,21	978.998	45,95
9	Banten	6.947	0,55	5.861	0,39	1.404	0,08	0	0,00	-	-
10	Nusa Tenggara Barat	20.092	1,59	98.941	6,56	188.740	10,40	24.609	30,08	1.636	0,08
11	Kalimantan Barat	2.022	0,16	6.133	0,41	227	0,01	0	0,00	-	-
12	Kalimantan Tengah	1.380	0,11	6.124	0,41	79	0,00	0	0,00	-	-
13	Kalimantan Timur	4.290	0,34	9.081	0,60	267	0,01	0	0,00	-	-
14	Sulawesi Utara	8.674	0,69	22.414	1,49	4.937	0,27	875	1,07	-	-
15	Sulawesi Selatan	17.549	1,39	24.052	1,59	124.381	6,85	387	0,37	58.700	2,75
	Provinsi lainnya	261.530	20,69	235.572	15,62	78.540	4,33	6.391	7,81	60.366	2,83
Indonesia		1.264.190	100,00	1.508.404	100,00	1.815.445	100,00	81.805	100,00	2.130.720	100,00
Share Kumulatif 15 Provinsi			79,31		84,38		95,67		92,19		97,17

Sumber : Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian seluruh Indonesia

Keterangan : 1) Tebu wujud produksi gula kristal putih/habur

*) Angka sementara

Sentra produksi daging sapi, daging ayam ras, daging ayam buras dan telur ayam juga dominan disumbang oleh provinsi di wilayah Jawa. Sementara provinsi sentra kelapa sawit berada di 2 pulau yaitu pulau Sumatera dan Kalimantan, yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi dan Sumatera Barat yang mendominasi produksi kelapa sawit Indonesia dengan kontribusi masing-masing 20,67%, 11,96%, 8,83%, 6,26% dan 2,72%, selanjutnya provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur masing-masing berkontribusi sebesar 15,91%, 11,33% dan 7,92 seperti tersaji pada Tabel 3.1.1c.

Tabel 3.1.1c. Provinsi Sentra Produksi Beberapa Komoditas Peternakan dan Kelapa Sawit, 2020

No.	Provinsi	Kelapa Sawit ¹⁾		Daging Sapi		Daging Ayam Ras		Daging Ayam Buras		Telur Ayam Ras	
		2020*)	Share (%)	2020*)	Share (%)	2020*)	Share (%)	2020*)	Share (%)	2020*)	Share (%)
1	Sumatera Utara	5.776.781	11,96	14.570	2,83	142.064	4,34	17.853	6,09	543.804	10,78
2	Sumatera Barat	1.312.253	2,72	22.022	4,27	59.821	1,83	5.309	1,81	301.530	5,98
3	Riau	9.984.315	20,67	8.611	1,67	100.101	3,06	3.113	1,06	12.972	0,26
4	Sumatera Selatan	4.267.023	8,83	11.615	2,25	89.826	2,74	4.353	1,48	145.182	2,88
5	Lampung	384.948	0,80	13.522	2,62	93.500	2,85	13.224	4,51	138.834	2,75
6	Jawa Barat	33.093	0,07	82.948	16,09	838.149	25,59	26.943	9,19	497.577	9,86
7	Jawa Tengah	-	-	64.154	12,44	638.540	19,50	34.201	11,67	530.220	10,51
8	Jawa Timur	-	-	105.874	20,53	474.869	14,50	50.562	17,25	1.732.437	34,34
9	Banten	27.423	0,06	41.394	8,03	207.424	6,33	4.123	1,41	216.888	4,30
10	Nusa Tenggara Barat	-	-	10.962	2,13	31.740	0,97	11.640	3,97	36.025	0,71
11	Kalimantan Barat	5.471.407	11,33	5.404	1,05	55.352	1,69	3.207	1,09	122.468	2,43
12	Kalimantan Tengah	7.685.770	15,91	3.851	0,75	22.700	0,69	2.235	0,76	7.843	0,16
13	Kalimantan Timur	3.823.221	7,92	7.489	1,45	43.816	1,34	5.075	1,73	35.388	0,70
14	Sulawesi Utara	-	-	3.484	0,68	10.139	0,31	2.772	0,95	28.216	0,56
15	Sulawesi Selatan	100.317	0,21	18.184	3,53	78.879	2,41	26.458	9,03	206.598	4,10
	Provinsi lainnya	9.430.520	19,53	101.543	19,69	388.406	11,86	82.072	28,00	488.413	9,68
	Indonesia	48.297.070	100,00	515.627	100,00	3.275.326	100,00	293.140	100,00	5.044.395	100,00
	Share Kumulatif 15 Provinsi		80,47		80,31		88,14		72,00		90,32

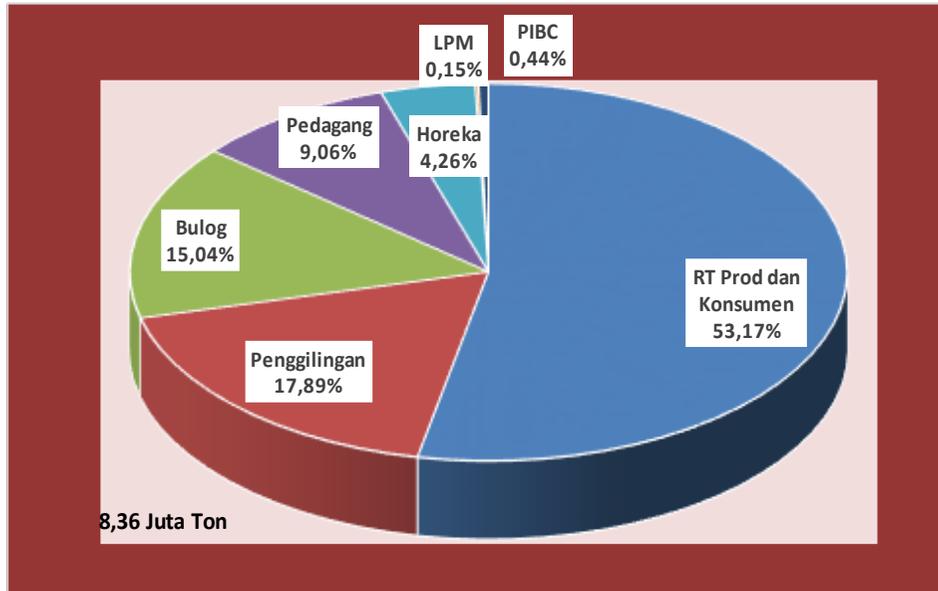
Sumber : Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian seluruh Indonesia

Keterangan : 1) Kelapa Sawit wujud produksi minyak sawit

*) Angka sementara

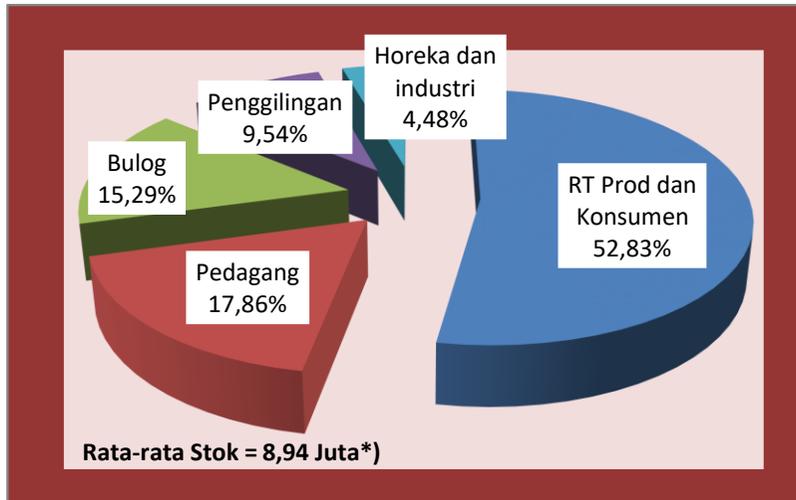
3.1.2. Stok Beras dan Pangan Strategis

Pengelolaan stok atau cadangan pangan bertujuan untuk mengantisipasi dan menangani masalah pangan, terutama untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang mencukupi, terdistribusi secara merata sepanjang waktu dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Menurut UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa stok/cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan di pemerintah dan masyarakat. Stok pangan merupakan jumlah pangan yang disimpan sebagai cadangan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan penghitungan sebaran stok beras yang bersumber dari BKP pada periode akhir Oktober 2021 terdapat stok beras sebesar 8,36 juta ton dengan urutan sebaran stok beras sebesar 53,17% berada di rumah tangga (produsen dan konsumen), disusul kemudian di penggilingan sebesar 17,89%, di Bulog 15,04%, di pedagang 9,06 %, di hotel, restoran dan catering (horeka) 4,26% , di PIBC 0,44% dan 0,15% di LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) (Gambar 3.1.4). Melihat data sebaran stok beras tersebut, menunjukkan stok beras sebagian besar berada di masyarakat dengan lokasi stok beras utamanya adalah di rumah tangga produsen atau petani di susul kemudian di penggilingan, dan pedagang beras, sementara stok beras di pemerintah adalah di Bulog.



Gambar 3.1.4. Sebaran Stok Beras, Oktober 2021

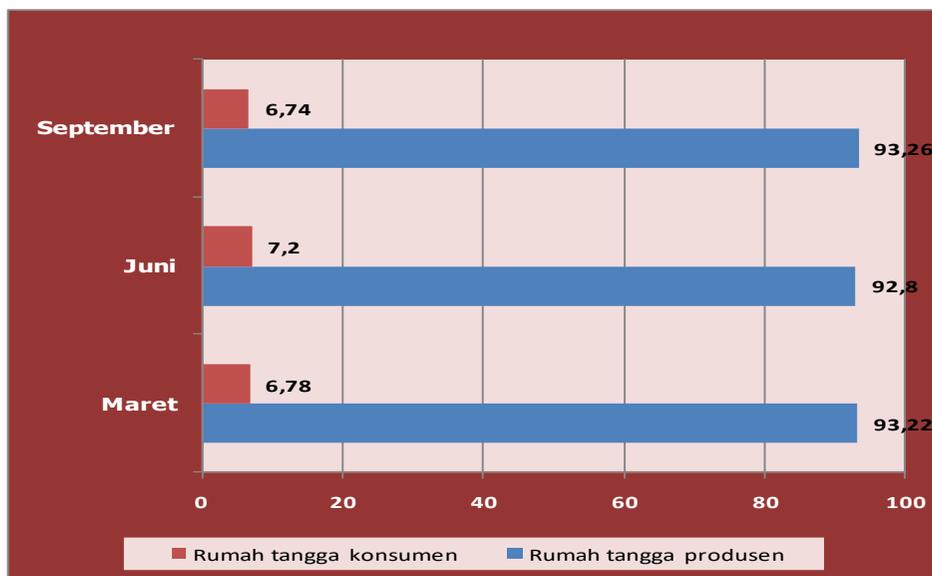
Gambaran sebaran stok beras tersebut sejalan dengan hasil survei kajian cadangan beras yang telah dilakukan oleh BPS pada tahun 2015 dengan melakukan 3 periode survei yaitu tanggal 31 Maret, 30 Juni dan 30 September 2015, dengan rata-rata stok beras pada periode tersebut sebesar 8,94 juta ton dan tersebar di rumah tangga produsen dan konsumen 52,83%, disusul di pedagang 17,86%, di Bulog 15,29%, penggilingan 9,54%, horeka dan industri sebesar 4,48%, seperti tersaji dalam Gambar 3.1.5.



Gambar 3.1.5. Rata - Rata Sebaran Stok Beras, 2015

Keterangan : *) Rata-rata dari 3 periode survei, Survei kajian cadangan beras BPS, 2015 diolah Pusdatin

Bila kita cermati lebih rinci, besarnya stok di rumah tangga produsen dan konsumen tersebut berdasarkan BPS 2015, sebagian besar stok berada di rumah tangga produsen atau petani mencapai lebih dari 92% dan sebagian besar berupa gabah/GKG dan sisanya di rumah tangga konsumen berupa wujud beras. Sebaran selama 3 periode survei yang dilakukan BPS tahun 2015 seperti tersaji pada Gambar 3.1.6. Sementara besarnya rata-rata stok gabah per rumah tangga produsen sebesar 3 kuintal dan rata-rata stok beras di rumah tangga konsumen sebesar 7 kg.



Gambar 3.1.6. Persentase Sebaran Stok Gabah/Beras di Rumah Tangga BPS, 2015

Sementara stok beras di pemerintah adalah stok beras yang berada di Bulog yang tersebar di 26 divre (divisi regional) di seluruh Indonesia. Selama Januari 2019 sampai dengan Oktober 2021, terjadi pola yang menarik untuk dicermati (Gambar 3.1.7). terlihat Januari 2019 hingga Februari 2020 rata-rata stok beras berada di atas 1,5 juta ton bahkan Juni hingga September 2019 menyentuh angka 2,3 juta ton, dan terlihat mulai Maret 2020 atau awal terjadinya masa Pandemi Covid-19 di Indonesia sampai dengan saat ini stok beras di Bulog memiliki pola stok pada kisaran 1 juta sd 1,5 juta ton dan posisi ini dianggap sebagai stok aman beras di Bulog. Namun pada Desember 2020 hingga Februari 2021 terlihat stok beras kurang dari 1 juta ton, dan sempat terjadi polemik untuk melakukan impor beras, disisi lain bulan Maret-April merupakan puncak panen raya padi di Indonesia, tentunya hal tersebut akan mempengaruhi harga dan penyerapan gabah petani nantinya, sehingga rencana impor beras tersebut tidak dilakukan. Kondisi tersebut sejalan dengan prognosa neraca beras yang telah disusun Kementerian Pertanian, bahwa persediaan beras dalam

negeri telah mencukupi kebutuhan beras masyarakat Indonesia setiap bulannya, bahkan surplus dan didukung juga oleh harga beras relatif stabil selama 3 tahun terakhir ini. Besarnya stok tahun 2019 di Bulog dibandingkan tahun 2020 disebabkan tidak adanya program penyaluran beras oleh Bulog pada tahun 2019, sementara pada masa Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai Maret 2020, Bulog telah diberi tugas melalui penyaluran program bantuan sosial akibat Pandemi covid 19 bekerjasama dengan Kementerian Sosial, sehingga stok berasnya terlihat menurun atau terjadi pengeluaran stok berasnya.



Gambar 3.1.7. Sebaran Stok Beras di Bulog, Januari 2019 s.d Oktober 2021

Selanjutnya stok pangan lainnya berdasarkan data BKP adalah stok jagung, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, gula pasir, daging sapi, telur, dan daging ayam dengan sebaran stok pada Oktober 2021 tersaji pada Tabel 3.1.2. menunjukkan institusi pemegang stok terbesar untuk jagung berada di pabrik pakan (Gabungan Pengusaha Makanan Ternak-GPMT), disusul di pedagang pengepul, agen, pedagang eceran dan usaha lain. Sedangkan stok bawang merah, bawang putih,

cabe besar dan cabe rawit utamanya berada di pedagang pengepul, agen dan grosir. Sementara untuk stok gula pasir utamanya berada di distributor, daging sapi berada di pedagang grosir dan eceran, daging ayam berada di agen, pedagang grosir dan eceran, telur ayam berada di grosir, distributor dan pengepul. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.2.

Tabel 3.1.2. Sebaran Stok Pangan Lainnya, Oktober 2021

Komoditas	GPMT	Pengepul	Grosir	Agen	Distributor	Eceran	Usaha Lain	Lainnya *)	Total
	Stok (Ton)								
Jagung	869.466	600.251	77.027	341.538	23	232.523	222.841	52.675	2.396.345
Bawang Merah		15.866	5.669	14.535	2.313	4.255	1.339	6.828	50.805
Bawang Putih		41.008	9.633	4.247	30.365	8.692	3.634	18.733	116.312
Cabe Besar		12.138	3.924	8.182	1.314	3.679	958	1.496	31.690
Cabe Rawit		16.207	1.975	7.125	994	2.877	867	1.162	31.206
Gula Pasir			16.388	13.732	180.560	17.518	1.960	29.694	259.853
Daging Sapi			17.639	3.061	2.191	20.111	4.251	3.056	50.310
Telur		27.636	55.492	16.427	27.908	9.496	11.801	30.726	179.485
Daging Ayam			37.200	53.651	28.389	44.215	18.481	52.081	234.017
% Sebaran Stok									
Jagung	36,28	25,05	3,21	14,25	0,001	9,70	9,30	2,20	100,00
Bawang Merah		31,23	11,16	28,61	4,55	8,37	2,64	13,44	100,00
Bawang Putih		35,26	8,28	3,65	26,11	7,47	3,12	16,11	100,00
Cabe Besar		38,30	12,38	25,82	4,15	11,61	3,02	4,72	100,00
Cabe Rawit		51,93	6,33	22,83	3,19	9,22	2,78	3,72	100,00
Gula Pasir			6,31	5,28	69,49	6,74	0,75	11,43	100,00
Daging Sapi			35,06	6,08	4,36	39,98	8,45	6,07	100,00
Telur		15,40	30,92	9,15	15,55	5,29	6,57	17,12	100,00
Daging Ayam			15,90	22,93	12,13	18,89	7,90	22,26	100,00

Sumber : BKP diolah Pusdatin

Keterangan : *) meliputi industri pengolahan, pemerintah dan lembaga nirlaba serta rumah tangga

3.1.3. *Import Dependency Ratio (IDR)* dan *Self Sufficiency Ratio (SSR)* Komoditas Pangan

Import Dependency Ratio (IDR) menggambarkan ketergantungan suatu negara terhadap impor suatu komoditas. Berdasarkan atas perhitungan nilai IDR beras seperti tersaji pada Tabel 3.1.3. menunjukkan pada periode tahun 2018 – 2020 supply beras Indonesia tergantung pada beras impor sangat kecil berkisar antara 1,01% sampai 5,62%. Ketergantungan pada beras impor masih dalam batas kewajaran kurang dari 6%, bahkan pada periode 2 (dua) tahun terakhir terlihat menurun drastis hingga tahun 2020 ketergantungan terhadap beras impor hanya 1,01%

Tabel 3.1.3. *Import Dependency Ratio (IDR)* dan *Self Sufficiency Ratio (SSR)* Beras, 2018 - 2020

No	Uraian	Tahun (Ton)		
		2018	2019	2020
1	Produksi			
	- Gabah	59.200.534	54.604.033	54.649.202
	- Beras	37.142.415	34.957.502	34.986.419
2	Ekspor	3.998	1.077	852
3	Impor	2.254.521	449.824	356.556
4	Produksi + Impor - Ekspor	39.392.937	35.406.249	35.342.123
5	IDR (%)	5,72	1,27	1,01
6	SSR (%)	94,29	98,73	98,99

Sumber : BPS diolah Pusdatin

Keterangan : Produksi Gabah Kering Giling (GKG) merupakan angka KSA, BPS

Konversi GKG ke beras sebesar 62,74% (2018), mulai 2019 sebesar 64,02% (SKGB, 2018)

Sementara, nilai *Self Sufficiency Ratio (SSR)* menunjukkan besarnya produksi beras dalam negeri kaitannya dengan kebutuhan beras untuk memenuhi konsumsi beras masyarakat. Nilai SSR komoditas beras Indonesia dari tahun 2018 hingga 2020 lebih dari 94%, bahkan tahun

2019-2020 mendekati 99% yang berarti bahwa sebagian besar kebutuhan beras Indonesia dapat dipenuhi oleh produksi domestik yang berarti Indonesia telah mencapai swasembada beras.

Selanjutnya terkait IDR dan SSR untuk komoditas pangan lainnya tahun 2018 - 2020 seperti tersaji dalam Tabel 3.1.4. menunjukkan terdapat 2 (dua) komoditas pangan utama yang memiliki nilai ketergantungan impor (IDR) relatif tinggi sekitar 73% - 90% yaitu kedelai dan gula yang digunakan untuk bahan baku industri, sedangkan ketergantungan terhadap daging sapi impor sekitar 25 - 29%. Kedelai sebagai bahan baku pada industri tahu, tempe dan kecap memiliki nilai IDR yang cukup besar mencapai 80-90% yang berarti ketergantungan Indonesia sebesar 80-90% terhadap kedelai impor untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri dan sisanya dipenuhi dari kedelai lokal. Demikian juga pemenuhan kebutuhan gula yang utamanya dalam wujud *raw sugar* digunakan oleh industri makanan dan minuman memiliki nilai IDR sebesar 73 sd 77% dan sisanya dipenuhi dari gula lokal.

Pemenuhan kebutuhan komoditas pangan utama lainnya seperti jagung (utama sebagai bahan pakan ternak), cabe, bawang merah, daging ayam dan telur ayam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri yang ditunjukkan dari nilai SSR mendekati 100%.

Tabel 3.1.4. *Import Dependency Ratio (IDR) dan Self Sufficiency Ratio (SSR) Pangan Lainnya, 2018 - 2020*

No.	Komoditas	IDR (%)			SSR (%)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Jagung	4,61	1,76	3,33	95,45	98,25	97,90
2	Kedelai	79,96	86,39	89,61	20,10	13,73	10,49
3	Cabe Merah	3,29	3,60	2,78	97,35	96,96	98,01
4	Bawang Merah	0,02	0,02	0,05	100,40	100,54	100,42
5	Gula	75,59	72,59	77,26	32,00	38,63	29,29
6	Daging Sapi	24,80	28,54	24,83	75,20	71,47	75,17
7	Daging Ayam	0,01	0,01	0,01	100,00	100,01	100,01
8	Telur Ayam	0,04	0,04	0,04	99,96	99,97	99,96

Sumber : BPS dan Kementerian Pertanian diolah Pusdatin

3.2. Aspek Keterjangkauan Pangan

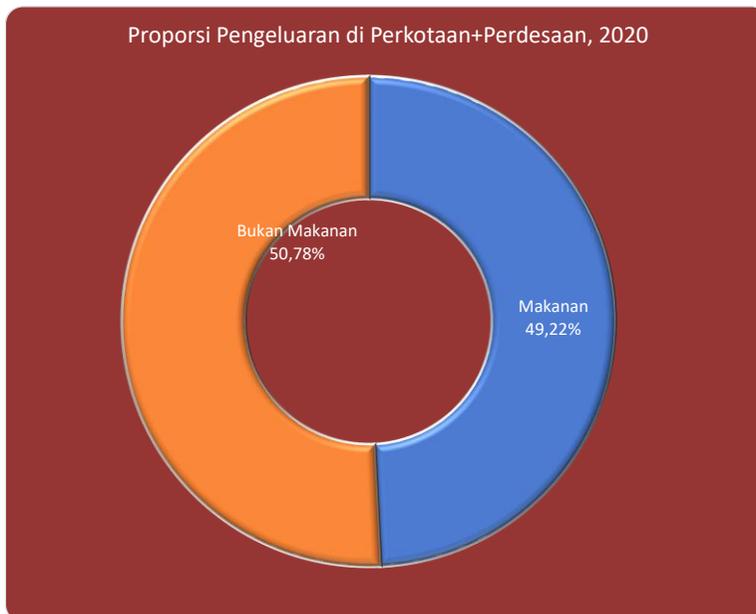
Aspek keterjangkauan pangan merupakan salah satu dari 3 (tiga) pilar dalam ketahanan pangan. *Center for Indonesia Policy Studies (CIPS)* menilai Indonesia saat ini belum mencapai ketahanan pangan. Hal tersebut karena aspek keterjangkauan pangan bagi masyarakat dinilai kerap luput dari perhatian pemerintah (repubika.co.id, 2021). Titik berat aspek ini adalah pada tercapainya pemerataan distribusi pangan dari provinsi yang surplus ke wilayah yang defisit. BPS dalam menghitung Indeks Ketahanan pangan, untuk aspek keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial diperoleh dari tiga indikator yaitu indikator pangan yang diproduksi di kecamatan, indikator tidak mengalami kesulitan menjangkau pembelian serta indikator harga pembelian tidak tinggi (IKP BPS, 2015).

Ada beberapa indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan aspek keterjangkauan pangan ini, yaitu dengan melihat bagaimana pendapatan masyarakatnya, kemudian seperti apa pola konsumsinya dan terakhir bagaimana tingkat kemiskinan dapat diperbaiki di semua wilayah. Analisis dalam subbab ini akan mengulas secara deskriptif bagaimana

capaian aspek keterjangkauan pangan dilihat dari pendapatan yang akan didekati dari pengeluaran per kapita, konsumsi dan angka kemiskinan.

3.2.1. Pengeluaran dan Konsumsi

Pengeluaran per kapita masyarakat dari hasil survei Susenas BPS dibedakan menjadi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Analisis dalam subbab ini akan melihat pola pengeluaran makanan per kapita dalam sebulan. Terdapat 14 kelompok bahan makanan yang disajikan yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi serta tembakau dan sirih. Pengeluaran untuk bahan makanan di wilayah perkotaan dan perdesaan tahun 2020 adalah sekitar 49,22% dari total pengeluaran per kapita dalam sebulan (Grafik 3.2.1).



Gambar 3.2.1. Pola Pengeluaran per Kapita Sebulan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2020

Pengeluaran untuk bahan makanan ini secara total untuk wilayah perkotaan dan perdesaan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 603.236,- per bulan (tabel 3.2.1). Pengeluaran ini meningkat 5,36% dari tahun 2019. Laju peningkatan tertinggi adalah pada kelompok sayur-sayuran yaitu sebesar 19,78%. Sementara terendah pada kelompok ikan dan makanan dan minuman jadi. Pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi ini memberi kontribusi tertinggi dalam pola pengeluaran masyarakat dan yang terendah adalah pengeluaran untuk umbi-umbian.

Tabel 3.2.1. Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Bahan Makanan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2016 – 2020

No.	Bahan Makanan	Perkotaan+Perdesaan					Pertumb. 2019- 2020 (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Padi-padian	64.566	61.455	66.936	64.961	66.789	2,81
2	Umbi-umbian	5.057	5.764	5.623	5.886	6.361	8,07
3	Ikan	33.620	40.478	43.352	45.304	46.570	2,80
4	Daging	20.526	24.987	23.006	24.783	26.441	6,69
5	Telur dan susu	28.025	29.357	32.196	32.435	34.860	7,48
6	Sayur-sayuran	34.505	42.397	39.664	37.898	45.393	19,78
7	Kacang-kacangan	10.349	11.252	11.292	11.273	11.654	3,38
8	Buah-buahan	19.268	22.850	28.486	27.444	30.116	9,74
9	Minyak dan lemak	12.705	13.588	13.527	13.211	14.155	7,15
10	Bahan minuman	16.019	17.078	17.162	16.823	18.337	9,00
11	Bumbu-bumbuan	9.166	9.656	10.755	10.830	11.810	9,05
12	Konsumsi lainnya	9.443	10.909	10.238	10.061	10.574	5,10
13	Makanan dan minuman jadi	133.834	172.600	189.223	201.107	206.736	2,80
14	Tembakau dan sirih	63.555	65.586	65.439	70.537	73.442	4,12
	Jumlah	460.639	527.956	556.899	572.551	603.236	5,36

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret - BPS

Tahun 2020, pangsa pengeluaran terbesar untuk bahan makanan adalah kelompok makanan dan minuman jadi sebesar 34,27% dari total pengeluaran untuk makanan. Pangsa terkecil adalah umbi-umbian yang hanya 1,05% saja dari total pengeluaran untuk makanan. Hal yang penting

untuk diperhatikan dalam grafik ini adalah pengeluaran untuk tembakau dan sirih yang mencapai 12,17% dan menjadi pengeluaran terbesar kedua setelah makanan dan minuman jadi. Sementara pangsa pengeluaran untuk padi-padian yang merupakan makanan pokok menempati urutan ketiga yaitu sebesar 11,07%. Pangsa pengeluaran untuk ikan, telur dan susu serta sayuran relatif tinggi dengan persentase di atas 5%. Sementara pengeluaran lainnya terlihat di bawah 5%, misalnya untuk daging 4,38% dan buah-buahan 4,99%. (Gambar 3.2.2).



Gambar 3.2.2. Pola Pengeluaran Bahan Makanan per Kapita Sebulan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2020

Pola pengeluaran bahan makanan pada Gambar 3.2.2 secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Dalam masyarakat modern saat ini, konsumsi makanan dan minuman jadi menjadi penciri yang utama. Banyaknya restoran siap saji bahkan sampai ke pelosok perdesaan membuat tingkat konsumsinya menjadi tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Keluarga modern saat ini cenderung ingin serba praktis dan meninggalkan kebiasaan memasak di

rumah. Hal ini terutama karena tuntutan kehidupan yang ada dimana banyak ibu bekerja lebih memilih membeli makanan siap saji.

Untuk melihat situasi ketahanan pangan suatu wilayah maka konsumsi pangan pokok seharusnya tergambar dalam pangsa pengeluarannya yang tinggi. Pada Gambar 3.2.2 dimana pangsa pengeluaran untuk rokok yang lebih tinggi dari pangan pokok dapat menjadi pengingat bagi semua pihak dalam memperbaiki kondisi sosial masyarakat yang secara tidak langsung akan berdampak pada situasi ketahanan pangannya.

Tabel 3.2.2. Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Bahan Makanan di Wilayah Perkotaan, 2016 – 2020

(Rp/Kap/Bln)

No.	Bahan Makanan	Perkotaan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi-padian	58.122	54.853	60.785	59.291	61.026
2	Umbi-umbian	4.486	5.012	4.954	5.156	5.709
3	Ikan	35.799	43.206	46.753	48.782	50.046
4	Daging	26.902	31.054	28.297	29.670	31.346
5	Telur dan susu	35.757	36.385	39.670	39.021	42.026
6	Sayur-sayuran	23.213	43.178	40.522	38.316	46.252
7	Kacang-kacangan	11.358	12.007	11.966	12.006	12.350
8	Buah-buahan	23.889	27.531	34.018	31.979	34.908
9	Minyak dan lemak	12.331	13.398	13.227	13.076	13.812
10	Bahan minuman	15.709	16.773	16.621	16.381	17.781
11	Bumbu-bumbuan	9.245	10.052	11.251	11.146	12.261
12	Konsumsi lainnya	10.349	11.768	10.910	10.735	11.384
13	Makanan dan minuman jadi	177.775	220.882	237.325	251.129	257.945
14	Tembakau dan sirih	63.696	63.984	64.663	70.444	73.457
	Jumlah	520.631	590.082	620.962	637.132	670.304

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret - BPS

Tabel 3.2.2 menyajikan perkembangan pengeluaran untuk konsumsi bahan makanan di perkotaan tahun 2016 – 2020. Tahun 2020 pengeluaran untuk total bahan makanan di wilayah perkotaan adalah sebesar Rp 670.304,/. Pengeluaran ini cenderung meningkat setiap tahunnya seiring dengan naiknya inflasi yang berimbas kepada harga bahan makanan. Sementara di wilayah perdesaan pengeluaran untuk bahan makanan adalah sekitar Rp 518.073,- dengan kecenderungan yang juga meningkat setiap tahunnya (Tabel 3.2.3). Pengeluaran untuk bahan makanan di perdesaan ini sekitar 22% lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan. Laju pertumbuhan pengeluaran untuk makanan setahun terakhir di wilayah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Hal ini bisa mengindikasikan inflasi perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Tabel 3.2.3. Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Bahan Makanan di Wilayah Perdesaan, 2016 – 2020

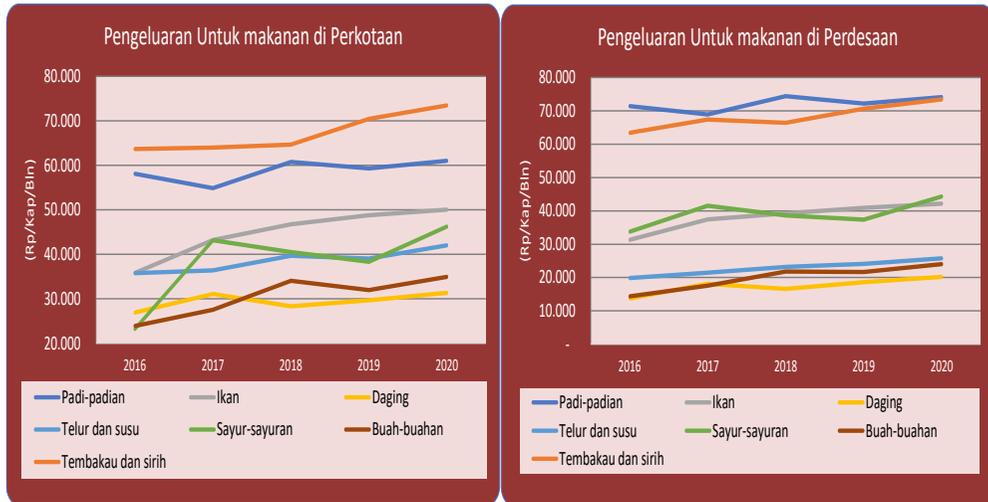
No.	Bahan Makanan	Perdesaan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi-padian	71.390	68.895	74.362	72.142	74.107
2	Umbi-umbian	5.663	6.611	6.430	6.811	7.189
3	Ikan	31.313	37.402	39.246	40.898	42.156
4	Daging	13.774	18.150	16.617	18.592	20.211
5	Telur dan susu	19.835	21.435	23.174	24.093	25.761
6	Sayur-sayuran	33.756	41.517	38.628	37.369	44.303
7	Kacang-kacangan	9.280	10.401	10.478	10.344	10.770
8	Buah-buahan	14.374	17.574	21.808	21.701	24.031
9	Minyak dan lemak	13.101	13.803	13.890	13.381	14.591
10	Bahan minuman	16.348	17.421	17.815	17.383	19.042
11	Bumbu-bumbuan	9.082	9.210	10.157	10.430	11.236
12	Konsumsi lainnya	8.483	9.941	9.427	9.206	9.545
13	Makanan dan minuman jadi	87.296	118.177	131.149	137.750	141.710
14	Tembakau dan sirih	63.405	67.391	66.376	70.654	73.422
	Jumlah	397.100	457.927	479.557	490.754	518.073

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret - BPS

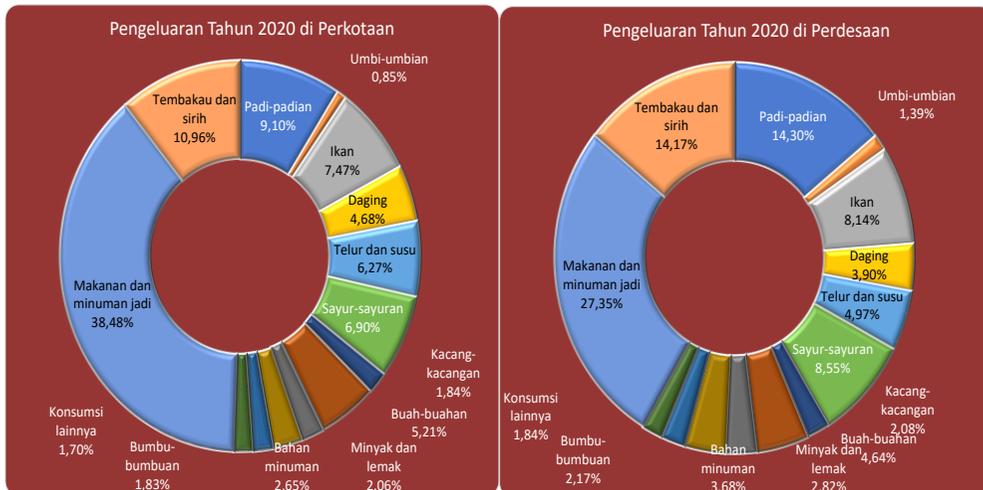
Jika data pengeluaran untuk bahan makanan ini disandingkan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, ada beberapa perbedaan yang sangat nyata dan menarik untuk dicermati. Dalam grafik ini pengeluaran

yang disajikan adalah komoditas pertanian dengan pangsa yang relatif besar yaitu padi-padian, ikan, daging, telur susu, sayuran dan buah-buahan. Pengeluaran untuk tembakau dan sirih sengaja ditambahkan untuk melihat keragaannya. Gambar 3.2.3 terlihat bahwa di wilayah perkotaan pengeluaran untuk tembakau dan sirih menduduki peringkat pertama, sementara di perdesaan kelompok padi-padian berada pada urutan pengeluaran teratas.

Pengeluaran untuk makanan di perkotaan cenderung merata untuk semua bahan makanan ini dengan terlihat garis yang ada tidak mengelompok secara tegas atau cukup menyebar. Sementara di perdesaan pengeluaran untuk makanan cenderung mengelompok menjadi 3 yaitu kelompok atas untuk padi-padian dan rokok, kelompok tengah untuk ikan dan sayuran, dan kelompok bawah untuk daging, telur susu dan buah-buahan.



Gambar 3.2.3. Perkembangan Pola Pengeluaran menurut Kelompok Bahan Makanan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2020



Gambar 3.2.4. Pola Pengeluaran Bahan Makanan per Kapita Sebulan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2020

Kelompok ikan dan sayuran baik di perkotaan dan perdesaan menempati peringkat yang sama, namun di perkotaan pengeluaran untuk telur dan susu juga seimbang. Pengeluaran untuk telur dan susu di perdesaan cenderung lebih rendah dan hampir sama dengan pengeluaran untuk daging serta buah-buahan. Pengeluaran untuk daging di wilayah perkotaan relatif rendah, diperkirakan karena masyarakat perkotaan mengkonsumsi daging dalam bentuk siap saji sehingga pengeluarannya masuk ke dalam pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi (Gambar 3.2.4).

Jika dilihat angka partisipasi konsumsi beberapa bahan makanan, beras sebagai pangan pokok dikonsumsi oleh 96,95% masyarakat. Tingkat partisipasi pangan pokok sumber karbohidrat lainnya seperti singkong, ubi jalar dan kentang berturut-turut adalah 24%, 12,27% dan 26,72%. Jagung muda dalam kelompok padi-padian tingkat partisipasi konsumsinya sekitar 15,07%. Konsumsi tepung terigu juga cukup tinggi yaitu 33,62% dan ini belum termasuk konsumsi mie yang bahan bakunya tepung terigu juga (Tabel 3.2.4).

Sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah telur ayam ras dengan tingkat partisipasi konsumsi 86,94%, sementara daging ayam sekitar 50,43%. Daging sapi, daging kambing serta telur lainnya tingkat partisipasi konsumsinya relatif masih rendah yaitu di bawah 7%. Susu yang banyak dikonsumsi sebagai sumber protein lainnya adalah susu kental manis yang secara medis tidak terlalu baik untuk kesehatan, sebesar 22,10%. Susu bubuk pabrikan juga relatif tinggi tingkat partisipasi konsumsinya yaitu sekitar 10,28%.

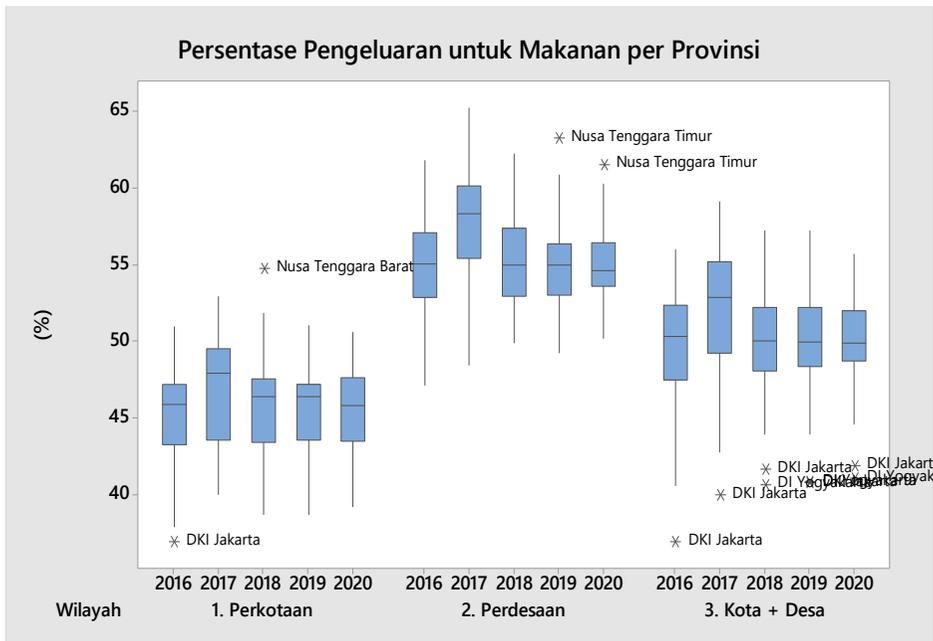
Bawang dan cabai sebagai pelengkap masakan masuk ke dalam kelompok sayur-sayuran, tingkat partisipasi konsumsinya di atas 50% kecuali cabai hijau hanya 14,46%. Sementara tingkat konsumsi buah-buahan yang relatif tinggi dalam kelompoknya adalah jeruk (25,19%), rambutan (18,57%), duku (22,66%) dan salak (11%). Sayuran dan buah-buahan lain tingkat partisipasi konsumsinya relatif rendah. Hal ini perlu menjadi perhatian dimana pencapaian ketahanan pangan juga perlu didukung dengan peningkatan kualitas dari sisi kesehatan untuk bahan pangan yang dikonsumsi.

Tabel 3.2.4. Tingkat Partisipasi Beberapa Bahan Makanan, 2016 - 2020

No.	Jenis Komoditas	Partisipasi Konsumsi Penduduk Indonesia (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi-padian					
	Beras	97,11	96,65	96,97	96,82	96,95
	Jagung basah dengan kulit	8,89	8,02	9,26	11,9	15,07
	Jagung pipilan/beras jagung	4,36	4,29	4,99	4,56	4,32
	Tepung terigu	28,51	34,42	34,35	34,03	33,62
	Padi-padian lainnya	-	0,28	1,22	1,38	1,22
2	Umbi-umbian					
	Ketela pohon/singkong	12,04	29,58	22,34	21,55	24,00
	Ketela rambat/ubi jalar	18,31	14,02	11,73	12,25	12,27
	Kentang	23,76	23,13	23,56	27,66	26,72
3	Daging					
	Daging sapi	6,01	6,58	6,76	7,17	6,99
	Daging kambing	-	0,32	0,34	0,28	0,31
	Daging ayam ras	43,60	47,97	46,73	48,82	50,43
4	Telur dan Susu					
	Telur ayam ras	80,57	83,04	83,18	85,28	86,94
	Telur ayam kampung	5,10	6,16	5,61	5,67	5,17
	Telur itik/telur itik manila	2,68	2,44	2,47	2,39	2,23
	Susu cair pabrik	4,81	5,18	6,21	7,32	7,83
	Susu kental manis	21,75	26,43	25,42	22,5	22,01
	Susu bubuk	-	9,64	10,18	10,35	10,28
5	Sayur-sayuran					
	Bawang merah	90,18	89,92	90,05	90,39	90,87
	Bawang putih	85,02	86,15	86,65	87,56	87,88
	Cabai merah	56,59	54,27	54,04	56,19	54,31
	Cabai hijau	-	14,05	14,14	15,17	14,46
	Cabai rawit	71,75	68,98	70,45	71,81	72,98
6	Kacang-Kacangan					
	Kacang tanah tanpa kulit	5,58	6,97	6,96	7,23	7,09
	Tahu	70,55	72,68	72,95	73,59	74,03
	Tempe	72,35	74,71	75,06	75,41	75,61
7	Buah-Buahan					
	Jeruk, jeruk bali	26,08	27,07	24,09	32,02	25,19
	Rambutan	22,29	4,85	27,65	19,07	18,57
	Duku, langsung	6,83	1,67	29,6	22,47	22,66
	Salak	12,23	17,55	14,51	12,16	11,00
8	Minyak dan Kelapa					
	Minyak Kelapa	2,94	6,78	8,17	7,24	6,33
	Minyak Goreng (kelapa sawit, bunga matahari)	92,84	87,79	87,14	87,98	89,08
	Kelapa (tidak termasuk santan instan)	33,48	28,54	26,61	26,25	25,61
9	Bahan Minuman					
	Gula Pasir	89,42	89,94	89,18	89,99	90,07
	Gula Merah, gula air	22,15	20,26	19,83	19,94	20,24
10	Bumbu-bumbuan					
	Garam	94,37	94,84	94,51	94,4	94,61
	Kemiri	43,24	47,94	43,29	42,85	43,11
	Kecap	55,95	60,88	56,9	55,8	56,69

Sumber: Susenas Maret, 2016-2020, BPS, diolah Pusdatin

Kedelai termasuk kelompok kacang-kacangan, banyak dikonsumsi dalam bentuk tahu dan tempe sebagai pangan tradisional Indonesia, dengan tingkat partisipasi konsumsinya masing-masing sebesar 74,03% dan 75,61%. Bahan pangan lainnya dengan tingkat partisipasi konsumsi yang tinggi adalah minyak goreng sawit (89,08%), gula pasir (90,07%) dan garam (94,61%). Secara lengkap tingkat partisipasi konsumsi bahan pangan ini dapat dilihat pada Tabel 3.2.4.

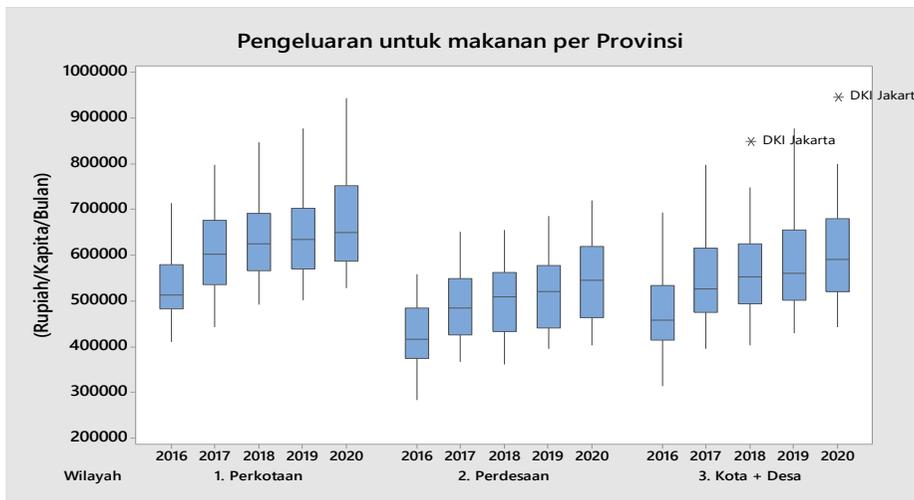


Gambar 3.2.5. Boxplot Persentase Pengeluaran untuk Makanan Menurut Provinsi, 2016 – 2020

Jika pengeluaran untuk makanan ini dicermati menurut provinsi maka dapat dilihat provinsi mana yang tingkat pengeluaran untuk makanannya tertinggi. Gambar 3.2.5 menunjukkan grafik boxplot persentase pengeluaran untuk makanan dibandingkan total pengeluaran di 34 provinsi. Untuk wilayah perkotaan, DKI Jakarta merupakan daerah dengan persentase pengeluaran untuk makanannya relatif rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. bahkan di tahun 2016 DKI merupakan pencalon rendah dimana persentase pengeluaran untuk makanannya di

bawah nilai Q1 untuk data seluruh provinsi yaitu sebesar 36,89%. Untuk wilayah total perkotaan + perdesaan DKI juga merupakan pencilan bawah bersama DI Yogyakarta pada periode 2016 – 2020.

Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah perkotaan merupakan provinsi dengan pengeluaran untuk makanan relatif tinggi dibandingkan provinsi lain. Tahun 2018 bahkan Nusa Tenggara Barat merupakan pencilan atas untuk wilayah perkotaannya, yaitu persentase pengeluaran untuk makanannya sebesar 54,68% dari total pengeluaran. Sementara untuk Nusa Tenggara Timur wilayah perdesaan, persentase pengeluaran untuk makanannya merupakan pencilan tinggi di tahun 2019 – 2020. Namun secara total perkotaan dan perdesaan, baik Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur tidak masuk ke dalam kategori ekstrim atau pencilan (Gambar 3.2.6).



Gambar 3.2.6. Boxplot Pengeluaran untuk Makanan menurut Provinsi, 2016 – 2020

Jika dilihat nilai absolutnya untuk pengeluaran per kapita selama sebulan, seluruh provinsi cenderung stabil dengan laju meningkat. Di wilayah perkotaan atau perdesaan tidak ada provinsi dengan data yang ekstrim dibandingkan provinsi lainnya. Namun jika dilihat total perkotaan

dan perdesaan, DKI Jakarta merupakan provinsi yang cukup ekstrim tinggi dibandingkan provinsi lain (Gambar 3.2.5). Pengeluaran per kapita dalam sebulan untuk makanan di DKI Jakarta pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 944.687,- naik 7,65% dibandingkan tahun 2019 (Tabel 3.2.5).

Tabel 3.2.5. Pengeluaran untuk Makanan menurut Provinsi, 2016 – 2020
(Rp/Kap/Bln)

No.	Provinsi	Perkotaan+Perdesaan					Pertumb. 2019- 2020 (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Aceh	451.967	529.162	547.668	559.303	595.635	6,50
2	Sumatera Utara	472.212	522.766	554.754	576.349	598.245	3,80
3	Sumatera Barat	537.233	584.045	604.871	609.232	644.853	5,85
4	Riau	556.701	603.401	599.873	621.802	668.074	7,44
5	Jambi	464.352	538.360	555.989	560.577	590.173	5,28
6	Sumatera Selatan	446.391	507.673	503.297	498.969	535.136	7,25
7	Bengkulu	447.397	523.329	548.879	542.474	573.500	5,72
8	Lampung	412.600	467.940	478.452	484.765	503.976	3,96
9	Kepulauan Bangka Belitung	596.366	721.045	710.401	751.665	771.121	2,59
10	Kepulauan Riau	681.574	759.544	747.944	789.143	800.424	1,43
11	DKI Jakarta	692.295	797.828	847.847	877.538	944.687	7,65
12	Jawa Barat	477.771	562.767	600.967	629.765	655.838	4,14
13	Jawa Tengah	371.625	421.515	460.891	469.403	496.173	5,70
14	DI Yogyakarta	433.954	490.249	529.012	546.474	579.279	6,00
15	Jawa Timur	427.198	476.861	502.761	502.857	521.577	3,72
16	Banten	532.435	623.084	672.918	702.350	756.673	7,73
17	Bali	465.994	569.168	599.976	609.238	675.146	10,82
18	Nusa Tenggara Barat	410.138	457.616	525.091	539.844	574.202	6,36
19	Nusa Tenggara Timur	312.301	399.251	402.922	429.471	442.700	3,08
20	Kalimantan Barat	451.189	519.469	535.534	561.144	584.259	4,12
21	Kalimantan Tengah	546.310	621.622	632.493	650.809	675.948	3,86
22	Kalimantan Selatan	531.164	612.237	626.241	628.932	675.979	7,48
23	Kalimantan Timur	587.897	663.535	702.905	724.379	790.469	9,12
24	Kalimantan Utara	549.480	667.280	671.612	717.782	743.894	3,64
25	Sulawesi Utara	484.952	594.833	560.514	568.026	590.062	3,88
26	Sulawesi Tengah	420.192	480.987	474.811	505.591	516.839	2,22
27	Sulawesi Selatan	407.417	450.618	495.465	487.898	516.183	5,80
28	Sulawesi Tenggara	371.747	409.857	457.497	475.206	506.740	6,64
29	Gorontalo	380.911	441.999	423.926	452.994	476.069	5,09
30	Sulawesi Barat	357.581	393.943	433.929	445.400	457.059	2,62
31	Maluku	431.514	485.033	491.426	507.233	532.135	4,91
32	Maluku Utara	413.589	486.734	502.810	514.276	537.605	4,54
33	Papua Barat	482.595	551.032	614.330	667.696	687.944	3,03
34	Papua	524.564	638.354	623.987	665.301	723.821	8,80
	INDONESIA	460.639	527.956	556.899	572.551	603.236	5,36

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret - BPS

Provinsi dengan pengeluaran untuk makanan terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Rp. 442.700,- atau naik 3,08% dibandingkan tahun 2019. Hal yang perlu dicermati di sini adalah

pertumbuhan atau laju kenaikan pengeluaran dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi Bali merupakan provinsi dengan laju kenaikan tertinggi yaitu sekitar 10,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi lainnya dengan laju kenaikan pengeluaran relatif tinggi di atas 8% adalah Kalimantan Timur dan Papua (Tabel 3.2.5). Hal ini disinyalir karena tingginya harga pangan sehingga inflasi yang terjadi juga cukup tinggi. Harga pangan yang tinggi sangat mempengaruhi aspek keterjangkauan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

3.2.2. Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia yang dihitung berdasarkan Survei Ekonomi Nasional Maret BPS, perkembangan jumlah penduduk miskin tahun 2016 sd. 2019 cenderung menurun dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin 2016 mencapai 28,01 juta orang, kemudian menurun tahun 2017 menjadi 27,77 juta orang, dan akhirnya tahun 2019 menjadi 25,14 juta orang, Namun tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat 5,09% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 26,42 juta orang. Kenaikan ini dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 (Tabel 3.2.6).

Tabel 3.2.6. Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi, 2016 – 2020

No.	Provinsi	Tahun					(000 Jiwa)
		2016	2017	2018	2019	2020	Pertumb. 2019-2020 (%)
1	Aceh	848,44	872,61	839,49	819,44	814,91	-0,55
2	Sumatera Utara	1.455,95	1.453,87	1.324,98	1.282,04	1.283,29	0,10
3	Sumatera Barat	371,56	364,51	357,13	348,22	344,23	-1,15
4	Riau	515,40	514,62	500,44	490,72	483,39	-1,49
5	Jambi	289,80	286,55	281,69	274,32	277,80	1,27
6	Sumatera Selatan	1.101,19	1.086,92	1.068,27	1.073,74	1.081,58	0,73
7	Bengkulu	328,61	316,98	301,81	302,30	302,58	0,09
8	Lampung	1.169,60	1.131,73	1.097,05	1.063,66	1.049,32	-1,35
9	Kepulauan Bangka Belitung	72,76	74,09	76,26	68,38	68,39	0,01
10	Kepulauan Riau	120,41	125,37	131,68	128,46	131,97	2,73
11	DKI Jakarta	384,30	389,69	373,12	365,55	480,86	31,54
12	Jawa Barat	4.224,33	4.168,44	3.615,79	3.399,16	3.920,23	15,33
13	Jawa Tengah	4.506,89	4.450,72	3.897,20	3.743,23	3.980,90	6,35
14	DI Yogyakarta	494,94	488,53	460,10	448,47	475,72	6,08
15	Jawa Timur	4.703,30	4.617,01	4.332,59	4.112,25	4.419,10	7,46
16	Banten	658,11	675,04	661,36	654,46	775,99	18,57
17	Bali	178,18	180,13	171,76	163,85	165,19	0,82
18	Nusa Tenggara Barat	804,44	793,78	737,46	735,96	713,89	-3,00
19	Nusa Tenggara Timur	1.149,92	1.150,79	1.142,17	1.146,32	1.153,76	0,65
20	Kalimantan Barat	381,35	387,43	387,08	378,41	366,77	-3,08
21	Kalimantan Tengah	143,49	139,16	136,93	134,59	132,94	-1,23
22	Kalimantan Selatan	195,70	193,92	189,03	192,48	187,87	-2,40
23	Kalimantan Timur	212,92	220,17	218,90	219,92	230,26	4,70
24	Kalimantan Utara	41,12	49,47	50,35	48,78	51,79	6,17
25	Sulawesi Utara	202,82	198,88	193,31	191,70	192,37	0,35
26	Sulawesi Tengah	420,52	417,87	420,21	410,36	398,73	-2,83
27	Sulawesi Selatan	807,03	813,07	792,63	767,80	776,83	1,18
28	Sulawesi Tenggara	326,86	331,71	307,10	302,58	301,82	-0,25
29	Gorontalo	203,19	205,37	198,51	186,03	185,02	-0,54
30	Sulawesi Barat	152,73	149,76	151,78	151,40	152,02	0,41
31	Maluku	327,72	320,51	320,08	317,69	318,18	0,15
32	Maluku Utara	74,68	76,47	81,46	84,60	86,37	2,09
33	Papua Barat	225,80	228,38	214,47	211,50	208,58	-1,38
34	Papua	911,33	897,69	917,63	926,36	911,37	-1,62
	Indonesia	28.005,39	27.771,22	25.949,80	25.144,72	26.424,02	5,09

Sumber: BPS, Susenas bulan Maret

Jumlah penduduk miskin tertinggi tahun 2020 adalah di Provinsi Jawa Timur sebesar 4,42 juta orang, kedua di Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,98 juta orang ketiga di Provinsi Jawa Barat sebesar 3,92 juta orang, keempat di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,28 juta orang dan kelima di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,15 juta orang. Sejumlah faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk miskin, karena adanya dampak tekanan akibat pandemi covid-19. Karena pandemi, terjadi

perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi, serta pendapatan dari semua lapisan masyarakat menurun (Tabel 3.2.6).

Tabel 3.2.7. Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi, 2016 – 2020

No.	Provinsi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	16,73	16,89	15,97	15,32	14,99
2	Sumatera Utara	10,35	10,22	9,22	8,83	8,75
3	Sumatera Barat	7,09	6,87	6,65	6,42	6,28
4	Riau	7,98	7,78	7,39	7,08	6,82
5	Jambi	8,41	8,19	7,92	7,60	7,58
6	Sumatera Selatan	13,54	13,19	12,80	12,71	12,66
7	Bengkulu	17,32	16,45	15,43	15,23	15,03
8	Lampung	14,29	13,69	13,14	12,62	12,34
9	Kepulauan Bangka Belitung	5,22	5,20	5,25	4,62	4,53
10	Kepulauan Riau	5,98	6,06	6,20	5,90	5,92
11	DKI Jakarta	3,75	3,77	3,57	3,47	4,53
12	Jawa Barat	8,95	8,71	7,45	6,91	7,88
13	Jawa Tengah	13,27	13,01	11,32	10,80	11,41
14	DI Yogyakarta	13,34	13,02	12,13	11,70	12,28
15	Jawa Timur	12,05	11,77	10,98	10,37	11,09
16	Banten	5,42	5,45	5,24	5,09	5,92
17	Bali	4,25	4,25	4,01	3,79	3,78
18	Nusa Tenggara Barat	16,48	16,07	14,75	14,56	13,97
19	Nusa Tenggara Timur	22,19	21,85	21,35	21,09	20,90
20	Kalimantan Barat	7,87	7,88	7,77	7,49	7,17
21	Kalimantan Tengah	5,66	5,37	5,17	4,98	4,82
22	Kalimantan Selatan	4,85	4,73	4,54	4,55	4,38
23	Kalimantan Timur	6,11	6,19	6,03	5,94	6,10
24	Kalimantan Utara	6,23	7,22	7,09	6,63	6,80
25	Sulawesi Utara	8,34	8,10	7,80	7,66	7,62
26	Sulawesi Tengah	14,45	14,14	14,01	13,48	12,92
27	Sulawesi Selatan	9,4	9,38	9,06	8,69	8,72
28	Sulawesi Tenggara	12,88	12,81	11,63	11,24	11,00
29	Gorontalo	17,72	17,65	16,81	15,52	15,22
30	Sulawesi Barat	11,74	11,30	11,25	11,02	10,87
31	Maluku	19,18	18,45	18,12	17,69	17,44
32	Maluku Utara	6,33	6,35	6,64	6,77	6,78
33	Papua Barat	25,43	25,10	23,01	22,17	21,37
34	Papua	28,54	27,62	27,74	27,53	26,64
	Indonesia	10,86	10,64	9,82	9,41	9,78

Sumber: BPS, Susenas bulan Maret

Tiga provinsi dengan jumlah dan persentase penduduk miskin terendah adalah Kalimantan Utara 51.790 orang (6,8%), Maluku Utara 86.370 orang(6,78%) dan Kepulauan Riau 131.970 orang (5,92%).

Sementara provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Papua (26,64%), Papua Barat (21,37%) dan NTT (20,90%). Secara rinci persentase penduduk miskin menurut provinsi untuk total perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Tabel 3.2.7.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode September 2019-Maret 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2020 sebesar 1,61, naik dibandingkan September 2019 yang sebesar 1,50. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami peningkatan dari 0,36 menjadi 0,38. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada tahun 2020 sebesar 7,38 persen. Jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta jiwa dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta jiwa pada Maret 2020. Persentase penduduk miskin terbanyak menurut provinsi pada tahun 2020 adalah Provinsi Bengkulu sebesar 14,77%, kedua Provinsi Sumatera Selatan sebesar 12,16%, ketiga DI.Yogyakarta sebesar 11,53%, keempat Jawa Tengah sebesar 10,09% dan Aceh sebesar sebesar 9,84%. Secara rinci persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan menurut provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.2.8.

Tabel 3.2.8. Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan menurut Provinsi, 2016 – 2020

No.	Provinsi	Tahun					Pertumb.
		2016	2017	2018	2019	2020	2019-2020 (%)
1	Aceh	10,82	11,11	10,44	9,68	9,84	1,65
2	Sumatera Utara	9,75	9,80	9,15	8,56	8,73	1,99
3	Sumatera Barat	5,54	5,14	4,86	4,76	4,97	4,41
4	Riau	6,4	6,79	6,35	6,28	6,12	-2,55
5	Jambi	10,86	10,94	10,41	9,81	10,41	6,12
6	Sumatera Selatan	12,74	12,45	12,18	12,19	12,16	-0,25
7	Bengkulu	16,19	16,33	15,25	14,70	14,77	0,48
8	Lampung	10,53	10,03	9,27	8,92	9,02	1,12
9	Kep. Bangka Belitung	2,78	2,89	3,09	2,85	3,06	7,37
10	Kepulauan Riau	5,16	5,20	5,45	5,33	5,42	1,69
11	DKI Jakarta	3,75	3,77	3,57	3,47	4,53	30,55
12	Jawa Barat	7,67	7,52	6,47	6,03	7,14	18,41
13	Jawa Tengah	11,44	11,21	9,73	9,20	10,09	9,67
14	DI Yogyakarta	11,79	11,72	11,03	10,89	11,53	5,88
15	Jawa Timur	7,94	7,87	7,06	6,84	7,89	15,35
16	Banten	4,51	4,52	4,38	4,12	5,03	22,09
17	Bali	3,68	3,58	3,32	3,29	3,33	1,22
18	Nusa Tenggara Barat	18,2	17,53	15,94	15,74	14,90	-5,34
19	Nusa Tenggara Timur	10,58	10,32	9,94	8,84	8,64	-2,26
20	Kalimantan Barat	5,16	4,88	5,03	4,60	4,69	1,96
21	Kalimantan Tengah	4,6	4,59	4,70	4,47	4,62	3,36
22	Kalimantan Selatan	3,48	3,46	3,54	3,53	3,61	2,27
23	Kalimantan Timur	3,93	3,99	4,14	4,31	4,45	3,25
24	Kalimantan Utara	3,78	4,59	5,46	5,10	5,06	-0,78
25	Sulawesi Utara	5,34	5,14	5,13	5,01	5,22	4,19
26	Sulawesi Tengah	10,18	10,16	10,15	9,32	8,76	-6,01
27	Sulawesi Selatan	4,51	4,48	4,61	4,44	4,49	1,13
28	Sulawesi Tenggara	6,74	7,56	6,56	6,81	7,14	4,85
29	Gorontalo	5,84	5,64	5,26	4,21	3,97	-5,70
30	Sulawesi Barat	8,59	8,53	9,64	9,63	9,59	-0,42
31	Maluku	7,66	7,24	6,22	5,84	6,23	6,68
32	Maluku Utara	3,32	3,61	3,80	4,27	4,53	6,09
33	Papua Barat	6,14	5,83	5,10	5,63	5,85	3,91
34	Papua	4,42	4,46	4,51	4,26	4,47	4,93
	Indonesia	7,79	7,72	7,02	6,69	7,38	10,31

Sumber: BPS, Susenas bulan Maret

Berdasarkan data Susenas diketahui dampak pandemi lebih dirasakan oleh penduduk miskin di perkotaan ketimbang perdesaan. Tercatat, disinyalir karena pandemi maka persentase penduduk miskin di

perkotaan naik sebesar 10,31% dan penduduk miskin di perdesaan naik 0,60% dibandingkan tahun 2019.

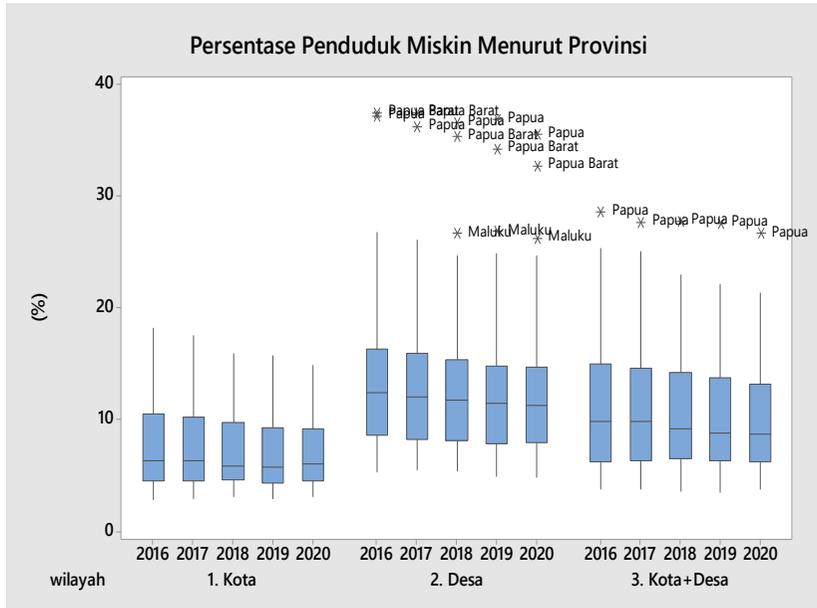
Persentase penduduk miskin perdesaan pada tahun 2020 sebesar 12,82%. Persentase penduduk miskin di perdesaan tertinggi adalah di Provinsi Papua sebesar 35,50% namun persentase ini turun dibandingkan periode tahun sebelumnya. Kedua Provinsi Papua Barat sebesar 32%, ketiga di Provinsi Maluku sebesar 26,21%, keempat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 24,73% dan kelima di Provinsi Bengkulu sebesar 15,16%.

Secara persentase penduduk miskin yang tinggal di perdesaan lebih tinggi dibanding penduduk miskin yang ada di perkotaan, yakni 12,82% berbanding 7,38%. Persentase penduduk miskin desa lebih tinggi dari kota, dan tingkat kedalaman maupun keparahan lebih dalam dibanding kota. Sehingga perlu perhatian khusus untuk mengangkat mereka yang di pedesaan agar bisa keluar dari kemiskinan. Secara rinci persentase jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan menurut provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.2.9.

Tabel 3.2.9. Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaan menurut Provinsi, 2016 – 2020

No.	Provinsi	Tahun					Pertumb.
		2016	2017	2018	2019	2020	2019-2020 (%)
1	Aceh	19,15	19,37	18,49	18,03	17,46	-3,16
2	Sumatera Utara	10,97	10,66	9,30	9,14	8,77	-4,05
3	Sumatera Barat	8,16	8,10	8,07	7,88	7,43	-5,71
4	Riau	9	8,43	8,09	7,62	7,29	-4,33
5	Jambi	7,32	6,92	6,75	6,53	6,23	-4,59
6	Sumatera Selatan	13,99	13,62	13,17	13,02	12,96	-0,46
7	Bengkulu	17,85	16,51	15,52	15,49	15,16	-2,13
8	Lampung	15,69	15,08	14,76	14,27	13,83	-3,08
9	Kepulauan Bangka Belitung	7,72	7,74	7,76	6,79	6,33	-6,77
10	Kepulauan Riau	10,43	10,92	10,77	11,04	10,43	-5,53
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	11,8	11,75	10,25	9,79	10,27	4,90
13	Jawa Tengah	14,89	14,77	12,99	12,48	12,80	2,56
14	DI Yogyakarta	16,63	16,11	15,12	13,89	14,31	3,02
15	Jawa Timur	16,01	15,82	15,30	14,43	14,77	2,36
16	Banten	7,45	7,61	7,33	7,49	8,18	9,21
17	Bali	5,23	5,45	5,38	4,88	4,78	-2,05
18	Nusa Tenggara Barat	15,17	14,89	13,72	13,45	13,09	-2,68
19	Nusa Tenggara Timur	25,17	25,03	24,74	24,91	24,73	-0,72
20	Kalimantan Barat	9,11	9,28	9,16	9,05	8,50	-6,08
21	Kalimantan Tengah	6,23	5,81	5,47	5,33	4,96	-6,94
22	Kalimantan Selatan	5,89	5,73	5,40	5,47	5,08	-7,13
23	Kalimantan Timur	10,05	10,50	9,84	9,31	9,51	2,15
24	Kalimantan Utara	9,47	10,78	9,36	9,02	9,46	4,88
25	Sulawesi Utara	10,97	10,77	10,48	10,56	10,25	-2,94
26	Sulawesi Tengah	15,91	15,54	15,51	15,26	14,69	-3,74
27	Sulawesi Selatan	12,46	12,59	12,24	11,95	11,97	0,17
28	Sulawesi Tenggara	15,49	15,29	14,77	14,09	13,50	-4,19
29	Gorontalo	24,41	24,52	24,09	23,79	23,45	-1,43
30	Sulawesi Barat	12,56	12,03	11,75	11,45	11,26	-1,66
31	Maluku	26,82	26,14	26,64	26,83	26,21	-2,31
32	Maluku Utara	7,44	7,40	7,78	7,78	7,70	-1,03
33	Papua Barat	37,48	37,44	35,31	34,19	32,70	-4,36
34	Papua	37,14	36,20	36,63	36,84	35,50	-3,64
	Indonesia	14,11	13,93	13,20	12,85	12,82	-0,23

Sumber: BPS, Susenas bulan Maret



Gambar 3.2.7. Boxplot Persentase Penduduk Miskin Wilayah Perkotaan, Perdesaan dan Total menurut Provinsi, 2016 – 2020

Gambar 3.2.7 menunjukkan hasil analisis boxplot yang merupakan jumlah ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis menggambarkan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2016-2020. Pada wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin tidak menunjukkan adanya wilayah yang ekstrim serta relatif stagnan dalam periode 2016 – 2020. Pada wilayah perdesaan, Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku merupakan 3 provinsi pencilon dimana persentasenya lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Namun secara total perkotaan dan perdesaan, hanya Provinsi Papua saja yang merupakan provinsi ekstrim.

3.3. Aspek Kualitas dan Keamanan Pangan

3.3.1. Konsumsi Energi/Kalori dan Protein

Aspek kualitas dan keamanan pangan, salah satunya dicerminkan dari tingkat konsumsi energi dan protein terhadap standar ideal berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2018 adalah 2.100 kkal/kapita/hari untuk energi dan 57 gram kapita/hari untuk protein. Konsumsi energi dan protein penduduk Indonesia tahun 2018 sd 2020 seperti tersaji pada Tabel 3.13, menunjukkan telah melebihi standar ideal yaitu konsumsi energi tahun 2020 sebesar 2.112 Kkal/kap/hari (100,57%) atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.121 Kkal/kap/hari (100,98%), demikian pula konsumsi protein mengalami penurunan dibandingkan dengan 2019 yaitu tahun 2020 menjadi 61,98 gram/kap/hari (108,74%).

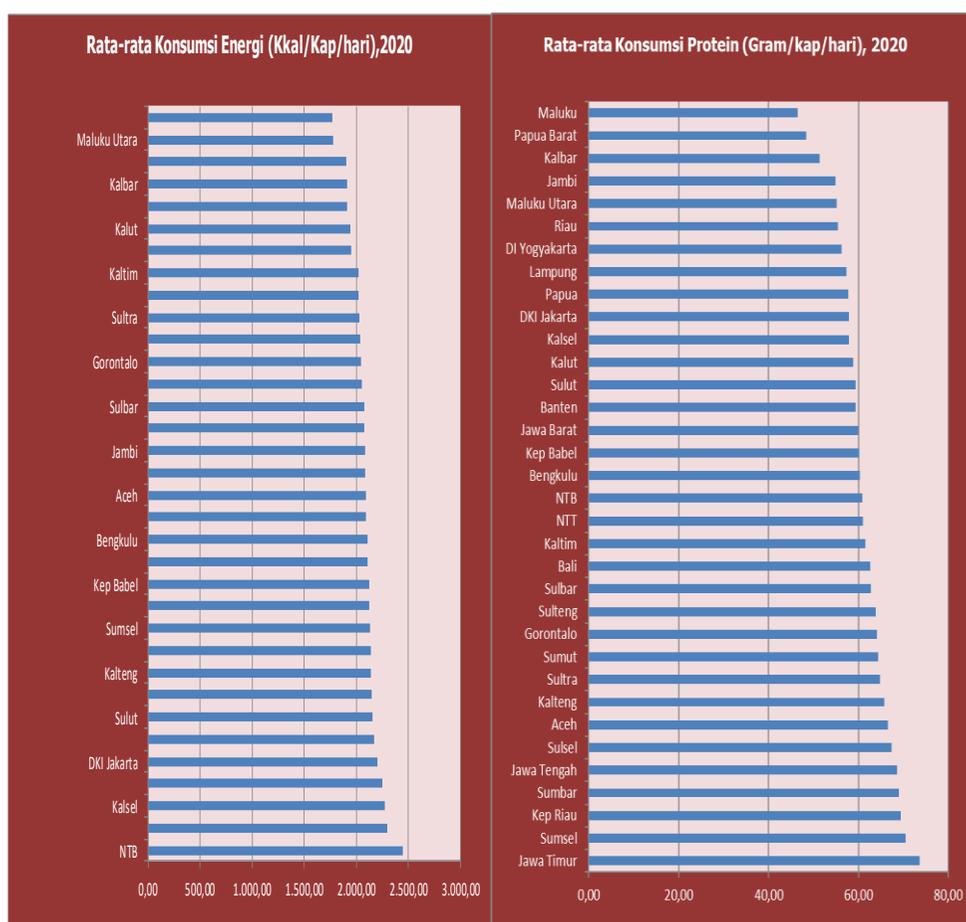
Tabel 3.3.1. Konsumsi Energi dan Protein Penduduk Indonesia, 2018-2020

Tahun	Kalori /Energi		Protein	
	Kkal/hari/kapita	% Thd Standar	Gram/kapita/hari	% Thd Standar
2018	2.147	102,24	62,19	109,11
2019	2.121	100,98	62,13	109,00
2020	2.112	100,57	61,98	108,74

Sumber : Susenas-Maret BPS

Meskipun secara nasional tingkat konsumsi energi telah melebihi standar kecukupan energi 2.100 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari, namun masih terdapat beberapa provinsi dengan tingkat konsumsi energi atau protein di bawah standar. Pada tahun 2020 terdapat 19 (sembilanbelas) provinsi dengan rata-rata konsumsi energi di bawah standar dan 7 (tujuh) provinsi dengan rata-rata konsumsi protein dibawah

standar (Gambar 3.3.1). Provinsi dengan rata-rata konsumsi energi per kapita/hari terendah adalah Maluku Utara dan Maluku masing-masing 1.773,4 kkal dan 1.772,15 kkal, sedangkan konsumsi energi tertinggi di provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 2.441.93 kkal. Sementara provinsi dengan rata-rata konsumsi protein per kapita per hari terendah terdapat di provinsi Papua Barat dan Maluku masing-masing 48,37 gram dan 46,52 gram, sedangkan tertinggi di provinsi Jawa Timur mencapai 73,66 gram.



Gambar 3.3.1. Rata - Rata Konsumsi Energi dan Protein per Provinsi, 2020

3.3.2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Selanjutnya bila dilihat dari keragaman konsumsi pangan nasional yang ditunjukkan dengan capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) seperti tersaji pada tabel 3.3.2, menunjukkan pola konsumsi pangan masih belum beragam dan bergizi seimbang, dilihat dari belum tercapainya skor PPH ideal 100. Dari tabel 3.3.2 menunjukkan terjadinya penurunan skor dari 87,9 pada tahun 2019 (dengan AKE 2.000 kkal/kap/hari) menjadi 86,3 pada tahun 2020 atau masih kurang 13,7% dari skor ideal (dengan AKE 2.100 kkal/kap/hari). Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan konsumsi energi dari lima kelompok pangan PPH, kecuali konsumsi kelompok pangan hewani serta minyak dan lemak masing-masing meningkat 1,5% dan 2,7% pada tahun 2020.

Tabel 3.3.2. Konsumsi Energi dan Skor Pola Pangan Harapan menurut Kelompok Pangan, 2018 - 2020

No.	Kelompok Pangan	Energi (kkal/kap/hari)				Skor PPH			
		2018	2019	2020	Ideal	2018	2019	2020	Ideal
1	Padi - padian	1.315	1.288	1.267	1.050	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi - umbian	53	50	48	126,0	1,2	1,2	1,2	2,5
3	Pangan Hewani	233	240	244	252,0	21,6	22,9	23,2	24,0
4	Minyak dan Lemak	240	242	249	210,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	22	21	20	63,0	0,5	0,5	0,5	1,0
6	Kacang-kacangan	60	59	56	105,0	5,6	5,6	5,3	10,0
7	Gula	78	76	75	105,0	1,8	1,8	1,8	2,5
8	Sayur dan Buah	113	109	102	126,0	26,2	26,0	24,4	30,0
9	Lain-lain	52	52	51	63,0	-	-	-	-
Total		2.165	2.138	2.112	2.100,0	87,0	87,9	86,3	100,0

Sumber : Susenas Maret, BPS diolah BKP

Keterangan: Angka Kecukupan Energi 2.100 kkal/kap/hari (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI, 2018)

3.3.3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan dan FIES

Prevalence of Undernourishment (PoU) merupakan proporsi penduduk yang mengalami kekurangan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Individu dikategorikan sebagai kekurangan konsumsi pangan apabila jumlah asupan energi per hari kurang dari kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan aktif. Standar minimum yang digunakan untuk perhitungan PoU disesuaikan dengan kebutuhan kalori individu menurut jenis kelamin, umur pada tinggi badan dan berat badan tertentu serta aktivitas yang dilakukan. Berdasarkan data PoU tahun 2018-2020 yang bersumber dari BPS seperti tersaji pada tabel 3.3.3, menunjukkan bahwa angka PoU Indonesia berfluktuatif yaitu tahun 2018 sebesar 7,92 % turun menjadi 7,63% di tahun 2019 dan kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 8,34%. Peningkatan PoU pada tahun 2020 sejalan dengan peningkatan kemiskinan, dimana persentase penduduk miskin telah mengalami peningkatan sebesar 0,37% tahun 2020 menjadi 9.78% atau 26,42 juta jiwa, hal ini sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 mulai Maret 2020.

Capaian PoU pada tingkat nasional ini juga sejalan dengan capaian di tingkat provinsi. Angka PoU di sebagian besar provinsi di Indonesia secara konsisten mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020, provinsi dengan angka PoU terendah adalah Provinsi Banten dan DKI Jakarta yaitu masing-masing sebesar 2,37% dan 2,43%, sedangkan provinsi dengan angka PoU tertinggi adalah Maluku dan Maluku Utara masing-masing sebesar 36,33% dan 35,87%, sementara provinsi Papua terjadi penurunan angka PoU yang cukup besar 18,5% dari 38,18% dengan status "sangat tinggi" pada tahun 2019 menjadi 31,11% dengan status "tinggi" tahun 2020 yang berarti makin berkurang penduduk

yang mengalami kekurangan konsumsi pangan, secara rinci sebaran PoU per provinsi tahun 2018-2020 disajikan pada Tabel 3.3.3.

Tabel 3.3.3. Prevelansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan per Provinsi, 2018 - 2020

No	Provinsi	2018		2019		2020	
		PoU (%)	Status	PoU (%)	Status	PoU (%)	Status
1	Aceh	8,66	sedang	9,39	sedang	9,31	sedang
2	Sumatera Utara	5,73	sedang	4,83	rendah	6,94	sedang
3	Sumatera Barat	5,45	sedang	4,89	rendah	6,31	sedang
4	Riau	9,63	sedang	8,30	sedang	9,58	sedang
5	Jambi	10,04	sedang	8,94	sedang	9,50	sedang
6	Sumatera Selatan	10,84	sedang	9,04	sedang	10,01	sedang
7	Bengkulu	8,70	sedang	7,66	sedang	8,27	sedang
8	Lampung	12,10	sedang	10,51	sedang	12,44	sedang
9	Kepulauan Bangka Belitung	10,06	sedang	7,84	sedang	9,76	sedang
10	Kepulauan Riau	4,39	rendah	4,09	rendah	6,41	sedang
11	DKI Jakarta	1,46	sangat rendah	1,43	sangat rendah	2,43	sangat rendah
12	Jawa Barat	3,81	rendah	3,69	rendah	4,01	rendah
13	Jawa Tengah	11,22	sedang	11,60	sedang	11,98	sedang
14	DI Yogyakarta	8,70	sedang	7,35	sedang	10,05	sedang
15	Jawa Timur	7,40	sedang	7,46	sedang	8,72	sedang
16	Banten	2,94	rendah	2,12	sangat rendah	2,37	sangat rendah
17	Bali	2,73	rendah	2,91	rendah	4,44	rendah
18	Nusa Tenggara Barat	5,96	sedang	2,76	rendah	3,08	rendah
19	Nusa Tenggara Timur	13,41	sedang	14,06	sedang	13,49	sedang
20	Kalimantan Barat	18,66	sedang	19,09	sedang	20,33	tinggi
21	Kalimantan Tengah	8,68	sedang	9,35	sedang	10,12	sedang
22	Kalimantan Selatan	2,67	rendah	2,51	rendah	2,88	rendah
23	Kalimantan Timur	10,15	sedang	6,95	sedang	8,50	sedang
24	Kalimantan Utara	11,03	sedang	10,10	sedang	12,08	sedang
25	Sulawesi Utara	3,12	rendah	3,96	rendah	4,75	rendah
26	Sulawesi Tengah	6,94	sedang	8,43	sedang	9,18	sedang
27	Sulawesi Selatan	6,20	sedang	7,63	sedang	10,73	sedang
28	Sulawesi Tenggara	7,09	sedang	8,76	sedang	10,49	sedang
29	Gorontalo	11,52	sedang	7,76	sedang	10,57	sedang
30	Sulawesi Barat	10,19	sedang	6,76	sedang	9,32	sedang
31	Maluku	34,07	tinggi	34,03	tinggi	35,33	sangat tinggi
32	Maluku Utara	30,67	tinggi	35,73	sangat tinggi	35,87	sangat tinggi
33	Papua Barat	21,15	tinggi	19,19	sedang	23,51	tinggi
34	Papua	38,32	sangat tinggi	38,18	sangat tinggi	31,11	tinggi
	Indonesia	7,92	sedang	7,63	sedang	8,34	sedang

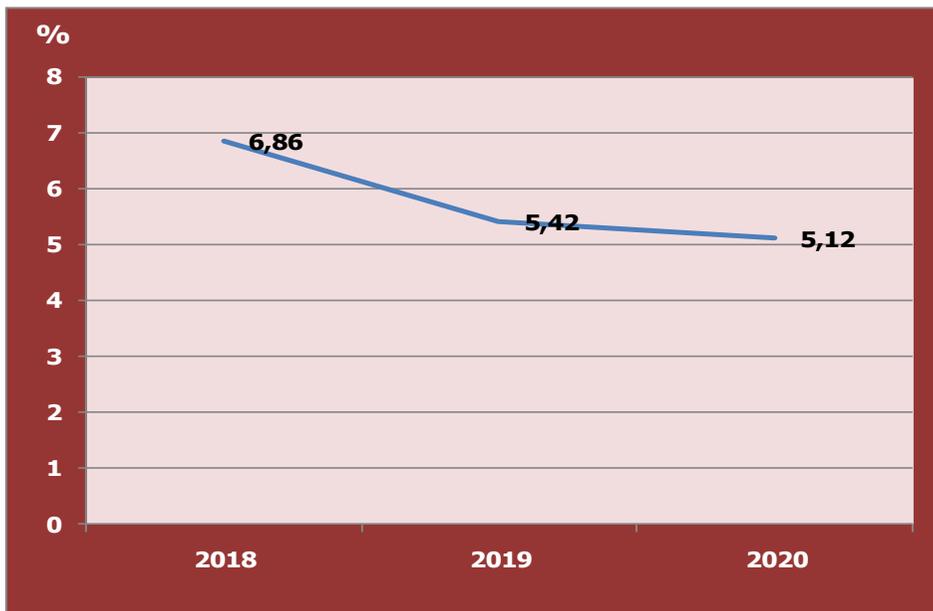
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret - BPS dan BKP Kementan

Keterangan : PoU (*Prevalence of Undernourishment*) atau Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Kerawanan pangan sedang dan berat dapat diukur dengan FIES (*Food Insecurity Experienced Scale*) yang merupakan angka kerawanan pangan berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan. Nilai skor FIES terdiri dari (1) rawan pangan ringan atau khawatir dengan skor < 4,

(2) sedang yaitu kompromi dengan kualitas dan jenis makanan atau kompromi dengan kuantitas makanan dengan skor 4-6 dan (3) parah yaitu tidak makan atau lapar karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya dengan skor 7-8.

Berdasarkan data yang bersumber dari BPS, perkembangan penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat di Indonesia tahun 2018-2020 tersaji pada Gambar 3.3.2, terlihat tren penurunan yang berarti persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan guna mencukupi kebutuhan energi sehari-hari makin berkurang, yaitu tahun 2018 sebesar 6,86% kemudian menurun hingga tahun 2020 menjadi 5,12%.



Gambar 3.3.2. Perkembangan Kerawanan Pangan dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (*FIES*) di Indonesia, 2018 - 2020

BAB IV. ANALISIS KETAHANAN PANGAN

4.1. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Pangan

Tingginya ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap konsumsi beras menyebabkan bahan pokok tersebut memiliki nilai strategis baik secara politik maupun ekonomi. Sehingga informasi perkiraan kondisi neraca ketersediaan dan kebutuhan beras melalui perhitungan prognosa sangat diperlukan sebagai acuan dalam perencanaan dan upaya penyediaan pangan nasional. Tim penyusun prognosa neraca pangan strategis yang dikoodinir oleh BKP dengan anggota tim dari Ditjen sub sektor lingkup Kementerian Pertanian, BPS dan Pusdatin, serta dilakukan *updating* data setiap akhir bulan sesuai rilis publikasi data penyusunnya. Berdasarkan prognosa neraca beras tahun 2021 yang dilakukan *update* data per 26 Oktober 2021. Perkiraan penyediaan beras Indonesia berasal dari perkiraan produksi GKG Januari-Desember berdasarkan KSA BPS sebesar 55,27 juta ton dengan total perkiraan produksi beras 31.65 juta ton. Perkiraan total kebutuhan beras 2021 sebesar 29,66 juta ton yang terdiri dari konsumsi langsung dalam rumah tangga sebesar 21,5 juta ton dan konsumsi di luar rumah tangga sebesar 8,16 juta ton. Sehingga tahun 2021 diperkirakan terjadi surplus sebesar 1,99 juta ton, dengan adanya stok akhir Desember 2020 sebesar 7,39 juta ton sehingga neraca beras kumulatif sd Desember 2021 menjadi 9,38 juta ton seperti tersaji tabel 4.1.1.

Tabel 4.1.1. Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Beras, Januari - Desember 2021

Bulan	Perkiraan Produksi GKG berdasar Rilis BPS 25 Okt '21	Perkiraan kehilangan produksi akibat banjir dan OPT	Perkiraan produksi GKG	Perkiraan Produksi (Beras)	Perkiraan Kebutuhan	Perkiraan Neraca Bulanan (Produksi - Kebutuhan)	Perkiraan Neraca Kumulatif (Surplus/ Defisit)	Perkiraan Neraca Kumulatif Tanpa Stok Akhir 2020
1	2	3	4=2-3	5 = konversi GKG ke beras berdasarkan SKGB 2018	6	7= 5 - 6	8 =stok awal+ 7	9 = kumulatif kolom 7
Stok Akhir Desember 2020							7.389.575	
Jan-21	2.083.252		2.083.252	1.201.356	2.508.732	-1.307.376	6.082.199	-1.307.376
Feb-21	4.056.991		4.056.991	2.339.560	2.265.951	73.609	6.155.808	73.609
Mar-21	9.671.598		9.671.598	5.577.356	2.508.732	3.068.624	9.224.431	3.068.624
Apr-21	7.771.058		7.771.058	4.481.364	2.432.728	2.048.636	11.273.068	2.048.636
May-21	3.949.995		3.949.995	2.277.858	2.619.898	-342.040	10.931.028	-342.040
Jun-21	4.035.004		4.035.004	2.326.881	2.427.805	-100.924	10.830.104	-100.924
Jul-21	5.510.292		5.510.292	3.177.640	2.510.717	666.923	11.497.027	666.923
Aug-21	4.164.374		4.164.374	2.401.485	2.508.732	-107.247	11.389.780	-107.247
Sep-21	4.368.327		4.368.327	2.519.099	2.427.805	91.294	11.481.074	91.294
Oct-21	4.507.217	180,289 ^(4,00%)	4.326.928	2.495.226	2.508.732	-13.506	11.467.567	-13.506
Nov-21	2.656.401	160,256 ^(4,00%)	2.550.145	1.470.602	2.427.805	-957.203	10.510.364	-957.203
Dec-21	2.495.109	99,804 ^(4,00%)	2.395.304	1.381.309	2.511.114	-1.129.805	9.380.558	-1.129.805
Total 2021	55.269.619	386.349	54.883.270	31.649.735	29.658.752	1.990.983	9.380.558	1.990.983

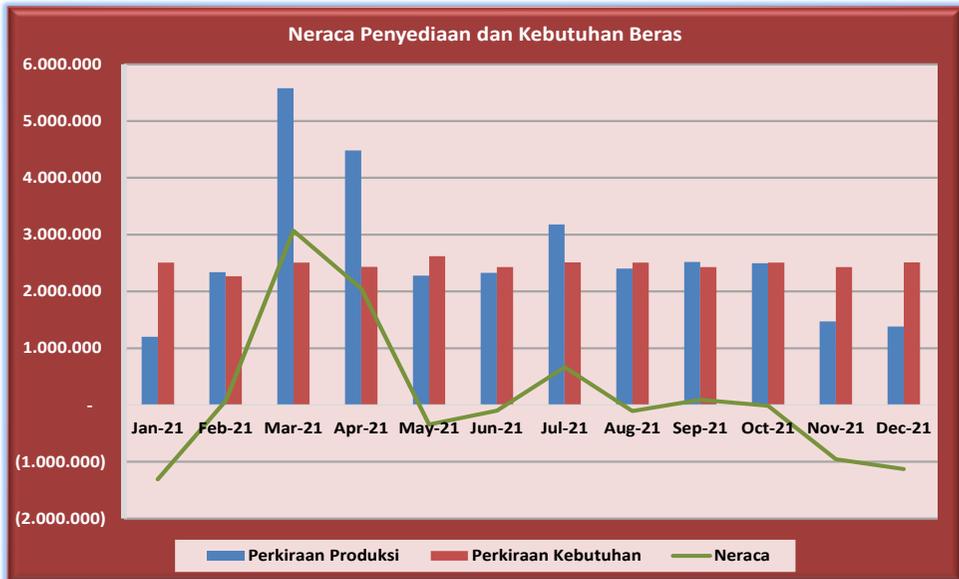
Sumber : Realisasi dan prognosa Pangan Strategis, BKP update per 26 Oktober 2021

Keterangan : 1. Perkiraan produksi GKG Jan-Des berdasarkan KSA BPS.

2. Konsumsi beras tahun 2021 terdiri dari konsumsi RT (Susenas BPS Tri I 2020) dan konsumsi luar RT (survei Bapok BPS 2017).

3. Sebaran stok beras yang tercatat per Minggu III Oktober 2021 sebesar 8.142.013 ton dengan rincian: a) Bulog 1,24 juta ton, b) Pedagang 731, 56 ribu ton, c) penggilingan 1,46 juta ton d) PIBC 38,48 ribu ton e) Horeka 345,63 ribu ton f) LPM 12,5 ribu ton g) rumah tangga 4,3 juta ton

Meskipun perkiraan neraca bulanan beras tahun 2021 terlihat surplus, namun terdapat bulan yang mengalami defisit yaitu Januari, Mei, Juni, Agustus dan Oktober s.d Desember dan bulan lainnya surplus (Gambar 4.1.1). Surplus neraca kumulatif bulanan beras tertinggi selama tahun 2021 terjadi pada bulan Maret 2021 sebesar 3,07 juta ton dan terendah terjadi pada Februari 2021 sebesar 73.6 ribu ton. Sementara defisit terbesar terjadi pada Januari dan Desember masing-masing 1,3 juta ton dan 1,13 juta ton, namun karena adanya stok akhir Desember 2020 dapat menutupi defisit tersebut.



Gambar 4.1.1. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Beras, Januari-Desember 2021

Jagung sebagai bahan baku pakan ternak, terlihat prognosa neraca jagung wujud pipilan kering tahun 2021 mengalami surplus sebesar 1,43 juta ton yang berasal dari ketersediaan sebesar 15,8 juta ton dengan kebutuhan sebesar 14,37 juta ton. Perkiraan neraca bulanan jagung pipilan selama tahun 2021 mengalami surplus pada Januari s.d April dan sebaliknya Mei s.d Desember mengalami defisit. Surplus neraca bulanan jagung pipilan kering terbesar pada bulan Februari sebesar 1,1 juta ton dan terendah pada bulan April sebesar 260,4 ribu ton. Sementara defisit terbesar terjadi pada Oktober sebesar 281,6 ribu ton, namun dengan adanya stok akhir Desember 2020 sebesar 1,43 juta ton dapat menutupi defisit tersebut bahkan sd Desember 2021 diperkirakan surplus 2,86 juta ton, seperti tersaji pada Tabel 4.1.2.

Tabel 4.1.2. Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Jagung dan Kedelai, Januari - Desember 2021

Bulan	Jagung (Ton)				Kedelai (Ton)			
	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif
Stok Akhir Desember 2020				1.425.895				450.000
21-Jan	1.436.421	894.374	542.047	1.967.942	235.751	267.182	-31.431	418.568
Feb-21	2.400.577	1.301.543	1.099.034	3.066.976	225.174	241.302	-16.128	402.440
Mar-21	2.316.402	1.566.268	750.134	3.817.110	264.506	267.366	-2.860	399.580
Apr-21	1.644.201	1.383.825	260.376	4.077.487	352.090	258.619	93.471	493.051
May-21	1.025.292	1.094.809	-69.517	4.007.969	228.316	267.262	-38.946	454.104
Jun-21	1.198.679	1.231.991	-33.312	3.974.658	268.503	259.054	9.449	463.554
Jul-21	965.503	1.207.943	-242.440	3.732.217	231.104	268.227	-37.123	426.431
Aug-21	1.084.715	1.137.148	-52.433	3.679.784	233.289	267.572	-34.283	392.147
Sep-21	1.124.505	1.345.733	-221.228	3.458.556	133.746	259.583	-125.837	266.311
Oct-21	851.119	1.132.678	-281.559	3.176.997	311.687	269.847	41.840	308.151
Nov-21	932.594	1.095.973	-163.379	3.013.618	249.380	260.259	-10.879	297.272
Dec-21	818.651	974.825	-156.174	2.857.444	188.312	268.254	-79.942	217.329
Total 2021	15.798.659	14.367.110	1.431.549	2.857.444	2.921.856	3.154.526	-232.670	217.329

Sumber: Prognosa - BKP update per 26 Oktober 2021

Total perkiraan penyediaan kedelai tahun 2021 sebesar 2,92 juta ton yang berasal dari produksi dalam negeri sebesar 213,5 ribu ton (7,31%) dan kedelai impor sebesar 2,71 juta ton (92,69%). Sementara perkiraan total kebutuhan kedelai 2021 sebesar 3,15 juta ton sehingga perkiraan neraca bulanan mengalami defisit 232,67 ribu ton. Namun adanya stok akhir Desember 2020 sebesar 450 ribu ton menyebabkan neraca kedelai kumulatif sd Desember 2021 surplus 217,3 ribu ton seperti tersaji tabel 4.1.2.

Tabel 4.1.3. Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Bawang Merah dan Bawang Putih, Januari - Desember 2021

Bulan	Bawang Merah (Ton)				Bawang Putih (Ton)			
	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif	Ketersediaan	Ketersediaan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif
Stok Akhir Desember 2020								134.576
21-Jan	114.183	82.209	31.974	31.974	46.698	46.996	-299	134.277
Feb-21	79.737	74.278	5.459	37.433	2.208	41.335	-39.127	95.151
Mar-21	87.527	81.387	6.140	43.573	7.335	45.140	-37.805	57.346
Apr-21	104.446	80.782	23.664	67.237	48.505	44.411	4.094	61.440
May-21	96.446	85.283	11.163	78.400	51.177	47.084	4.093	65.533
Jun-21	105.689	79.230	26.459	104.859	34.638	43.391	-8.753	56.780
Jul-21	79.061	83.162	-4.101	100.758	48.786	49.091	-304	56.466
Aug-21	128.537	86.182	42.355	143.113	79.250	47.831	31.419	87.895
Sep-21	90.568	82.330	8.238	151.351	60.534	44.519	16.015	103.910
Oct-21	85.214	79.709	5.505	156.857	32.742	46.289	-13.547	90.363
Nov-21	56.275	79.030	-22.755	134.102	72.725	45.299	27.426	117.789
Dec-21	75.645	81.160	-5.515	128.587	123.159	45.502	77.657	195.446
Total 2021	1.103.328	974.741	128.587	128.587	607.758	546.888	60.870	195.446

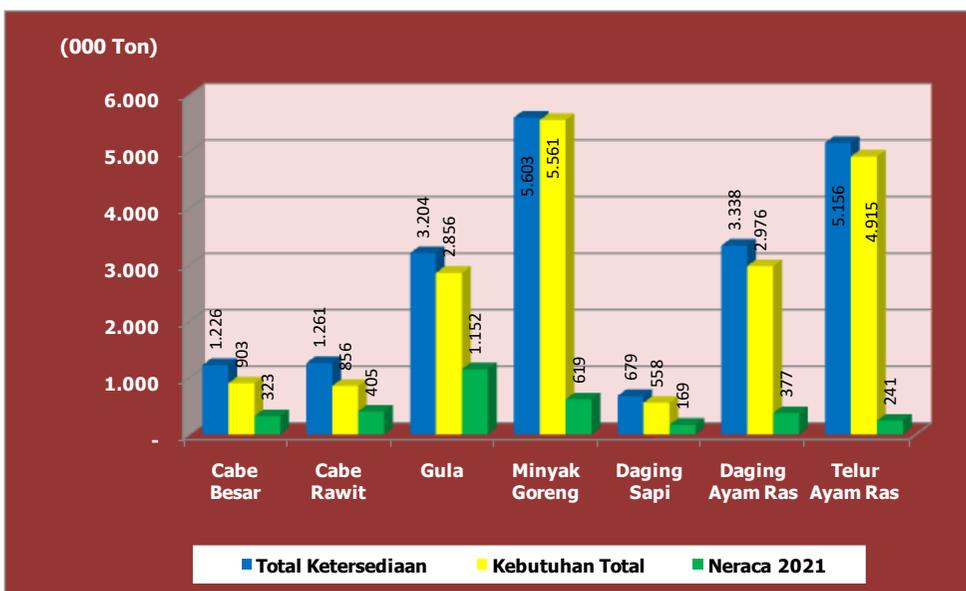
Sumber: Prognosa - BKP update per 26 Oktober 2021

Tabel 4.1.3. menunjukkan bahwa prognosa neraca bawang merah dalam negeri tahun 2021 surplus sebesar 128,59 ribu ton. Perkiraan neraca bulanan bawang merah selama tahun 2021 hampir di semua bulan mengalami surplus kecuali bulan Juli, November dan Desember mengalami defisit. Surplus terbesar bawang merah tahun 2021 yaitu di bulan Agustus sebesar 42.355 ton dan terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 5.459 ton.

Sementara prognosa neraca bawang putih, ketersediaan tahun 2021 sebesar 96% berasal dari bawang putih impor. Tabel 4.1.3 terlihat neraca bulanan mengalami surplus 60,87 ribu ton ditambah adanya stok akhir Desember 2020 sebesar 134,58 ribu ton sehingga surplus kumulatif 2021 menjadi 195,45 ribu ton. Perkiraan neraca bulanan bawang putih selama tahun 2021 terlihat surplus pada bulan April, Mei Agustus, September, November dan Desember dan sebaliknya terjadi defisit pada Januari s.d Maret, Juni dan Juli serta Oktober. Surplus terbesar terjadi

bulan Desember sebesar 77,87 ribu ton dan defisit terbesar pada Februari sebesar 39,13 ribu ton.

Neraca penyediaan dan kebutuhan komoditas lainnya seperti cabe besar, cabe rawit, gula, minyak goreng, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan telur ayam ras selama tahun 2021 terlihat mengalami surplus artinya ketersediaan secara nasional aman namun distribusi dan akses untuk sampai ke masyarakat yang harus diperhatikan (Gambar 4.1.2).



Gambar 4.1.2. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Cabe Besar, Cabe Rawit, Gula, Minyak Goreng, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras, 2021

Neraca penyediaan dan kebutuhan cabe besar dan cabe rawit tahun 2021 mengalami surplus masing-masing sebesar 322,74 ribu ton dan 404,97 ribu ton. Surplus neraca bulanan tertinggi untuk cabe besar dan cabe rawit terjadi pada bulan Juni 2021, masing-masing sebesar 39,19 ribu ton dan 51,98 ribu ton. Sementara itu surplus neraca bulanan terendah cabe besar terjadi pada Oktober 2021 sebesar 13,76 ribu ton dan untuk cabe rawit pada Desember 2021 sebesar 14,92 ribu ton (Tabel 4.1.4)

Tabel 4.1.4. Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Cabe Besar dan Cabe Rawit, Januari - Desember 2021

Bulan	Cabe Besar (Ton)			Cabe Rawit (Ton)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan
Jan-21	108.937	73.611	35.326	105.119	68.897	36.222
Feb-21	103.213	66.487	36.725	92.366	62.230	30.136
Mar-21	107.815	76.654	31.161	115.043	72.688	42.355
Apr-21	113.580	75.836	37.744	118.029	72.376	45.653
May-21	111.175	79.711	31.463	103.020	76.726	26.294
Jun-21	113.376	74.182	39.194	122.322	70.343	51.978
Jul-21	98.149	78.183	19.966	94.765	73.723	21.042
Aug-21	96.639	76.654	19.984	101.448	72.688	28.760
Sep-21	94.182	74.182	20.000	114.170	70.343	43.827
Oct-21	90.419	76.654	13.765	107.184	72.688	34.496
Nov-21	94.016	74.182	19.834	99.629	70.343	29.286
Dec-21	94.576	76.994	17.582	88.001	73.079	14.922
Total 2021	1.226.075	903.329	322.745	1.261.096	856.125	404.971

Sumber : Prognosa - BKP update per 26 Oktober 2021

Tabel 4.1.5 menunjukkan prognosa neraca gula dalam negeri tahun 2021 surplus sebesar 347,69 ribu ton, dengan adanya stok akhir Desember 2020 sebesar 804,69 ribu ton maka surplus kumulatif sd Akhir Desember 2021 menjadi 1,15 juta ton. Surplus neraca bulanan gula tertinggi terjadi pada Agustus sebesar 277,16 ribu ton dan terendah terjadi pada Oktober sebesar 1.636 ton.

Sementara perkiraan neraca bulanan minyak goreng secara umum surplus kecuali bulan Januari dan Maret mengalami defisit masing-masing sebesar 105,2 ribu ton dan 18,2 rubu ton. Adanya stok minyak goreng di akhir Desember 2020 sebesar 576 ribu ton sehingga neraca kumulatif bulanan minyak goreng selama tahun 2021 surplus sebesar 618,59 ribu ton (Tabel 4.1.5).

Tabel 4.1.5. Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Gula dan Minyak Goreng, Januari - Desember 2021

Bulan	Gula (Ton)				Minyak Goreng (Ton)			
	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif
Stok Akhir Desember 2020				804.685				576.000
Jan-21	67.108	237.127	-170.019	634.666	353.000	458.200	-105.200	470.800
Feb-21	293.587	214.179	79.407	714.074	551.000	472.500	78.500	549.300
Mar-21	177.761	237.127	-59.366	654.708	455.000	473.200	-18.200	531.100
Apr-21	277.463	234.945	42.518	697.225	498.000	483.400	14.600	545.700
May-21	211.989	295.586	-83.598	613.628	498.000	488.800	9.200	554.900
Jun-21	388.677	229.478	159.199	772.827	455.123	446.199	8.924	563.824
Jul-21	461.594	237.352	224.242	997.069	470.517	461.291	9.226	573.050
Aug-21	514.286	237.127	277.159	1.274.228	470.294	461.072	9.221	582.271
Sep-21	479.689	229.478	250.211	1.524.439	455.123	446.199	8.924	591.195
Oct-21	238.763	237.127	1.636	1.526.076	470.294	461.072	9.221	600.417
Nov-21	79.385	229.478	-150.092	1.375.984	455.123	446.199	8.924	609.341
Dec-21	13.815	237.427	-223.612	1.152.372	471.708	462.459	9.249	618.590
Total 2021	3.204.117	2.856.431	347.687	1.152.372	5.603.183	5.560.593	42.590	618.590

Sumber : Prognosa - BKP update per 26 Oktober 2021

Pada Tabel 4.1.6 terlihat stok akhir Desember 2020 untuk daging sapi sebesar 47,84 ribu ton merupakan stok yang berada di *cold storage* importir dan di kandang untuk sapi bakalan setara daging di *feedloter*, sedangkan stok akhir untuk daging ayam ras sebesar 15 ribu ton merupakan stok daging ayam beku di *cold storage* pelaku usaha. Produksi daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras periode Januari-September 2021 merupakan angka realisasi dan produksi Oktober - Desember 2021 merupakan angka potensi Ditjen PKH.

Tabel 4.1.6. Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Daging Sapi/Kerbau, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras, Januari - Desember 2021

Bulan	Daging Sapi/Kerbau (Ton)				Daging Ayam Ras (Ton)				Telur Ayam Ras (Ton)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan
Stok Akhir Desember 2020				47.836				15.000			
Jan-21	41.550	36.321	5.229	53.065	269.989	269.234	755	15.755	423.067	419.716	3.351
Feb-21	38.679	35.360	3.319	56.384	259.180	243.179	16.001	31.756	404.945	379.098	25.847
Mar-21	47.386	35.895	11.491	67.875	266.579	269.234	-2.655	29.101	424.390	419.716	4.674
Apr-21	53.671	37.054	16.617	84.492	277.002	266.536	10.466	39.567	444.459	435.004	9.455
May-21	48.974	44.680	4.294	88.786	298.861	288.237	10.624	50.191	479.462	474.979	4.483
Jun-21	47.320	35.719	11.601	100.387	328.887	260.549	68.338	118.529	421.364	406.177	15.187
Jul-21	155.482	141.842	13.640	114.027	255.041	203.140	51.901	170.430	429.518	420.513	9.005
Aug-21	56.114	36.508	19.606	133.633	251.355	219.426	31.929	202.359	425.696	373.547	52.149
Sep-21	49.372	35.369	14.003	147.636	242.422	221.467	20.955	223.315	411.028	377.745	33.283
Oct-21	44.692	35.525	9.167	156.803	229.375	228.849	526	223.841	426.241	377.744	48.497
Nov-21	45.542	40.706	4.836	161.639	331.066	234.494	96.572	320.413	418.241	406.177	12.064
Dec-21	49.920	42.892	7.027	168.666	328.260	271.534	56.726	377.139	447.587	424.166	23.421
Total 2021	678.702	557.872	120.830	168.666	3.338.017	2.975.878	362.139	377.139	5.155.998	4.914.582	241.416

Sumber : Prognosa - BKP update per 26 Oktober 2021

Total ketersediaan daging sapi tahun 2021 sebesar 678,7 ribu ton sementara kebutuhan 557,87 ribu ton sehingga perkiraan neraca tahun 2021 sebesar 120,83 selanjutnya ditambah stok akhir Desember 2020 sebesar 47,84 ribu ton sehingga surplus kumulatif sd akhir Desember 2021 sebesar 168,67 ribu ton. Perkiraan neraca bulanan daging sapi selama tahun 2021 selalu mengalami surplus, dengan surplus tertinggi terjadi pada Agustus sebesar 19,6 ribu ton dan terendah terjadi Februari sebesar 3.319 ton (Tabel 4.1.6).

Prognosa neraca daging ayam ras 2021 mengalami surplus sebesar 362,14 ribu ton dengan adanya tambahan dari stok akhir Desember 2020 sebesar 15 ribu ton sehingga surplus kumulatif sd Desember 2021 menjadi 377,14 ribu ton. Perkiraan neraca bulanan daging ayam ras tahun 2021 terlihat defisit pada Maret sebesar 2.655 ton, sementara bulan-bulan lainnya surplus dengan surplus tertinggi pada November 2021 sebesar 96,57 ton dan terendah pada Oktober sebesar 526 ton (Tabel 4.1.6).

Prognosa neraca telur ayam ras tahun 2021 terlihat surplus sebesar 241,42 ribu ton, dengan sebaran per bulannya selalu surplus. Surplus neraca bulanan tertinggi untuk telur ayam ras terjadi pada bulan Agustus sebesar 52,15 ribu ton dan terendah terjadi pada Januari sebesar 3,35 ribu ton (Tabel 4.1.6).

Bila dicermati perkiraan kebutuhan bulanan tertinggi untuk cabe besar, cabe rawit, gula, minyak goreng, daging ayam ras, dan telur ayam ras di dalam negeri terjadi pada bulan Mei 2021, dikarenakan pada bulan tersebut terdapat hari besar keagamaan nasional yaitu hari Raya Idul Fitri. Sedangkan perkiraan kebutuhan bulanan tertinggi untuk daging sapi/kerbau selama tahun 2021 terjadi pada bulan Juli 2021, hal ini bertepatan dengan bulan perayaan hari besar keagamaan yaitu hari raya Idul Adha.

4.2. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah nilai komposit dari indikator indikator yang digunakan untuk memotret status ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP dihitung berdasarkan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas dan kemaan pangan. IKP nasional memiliki peran yang sangat strategis untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. Selanjutnya IKP diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan tahun 2018 sd 2020 yang dihitung berdasarkan 9 indikator untuk wilayah provinsi dan kabupaten serta 8 indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan 3 aspek

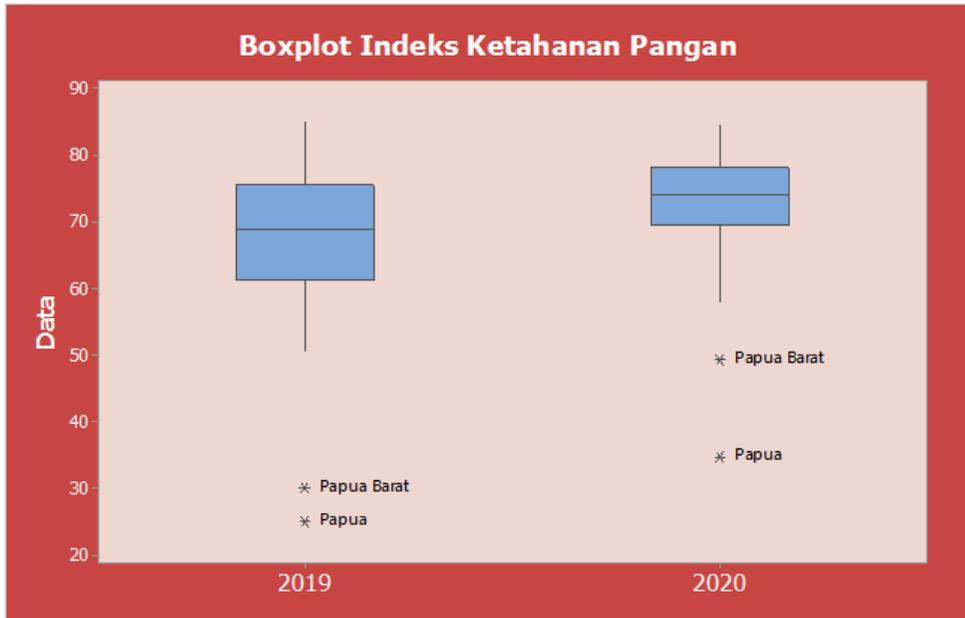
ketahanan pangan. Secara umum wilayah Indonesia bagian barat memiliki nilai IKP lebih baik dibandingkan dengan Indonesia bagian timur. Sepuluh provinsi dengan urutan skor terbaik tahun 2020 adalah Bali (84,54), Jawa Tengah (82,31), Sulawesi Selatan (81,81), DI. Yogyakarta (80,67), Gorontalo (80,40), Kalimantan Selatan (80,04), Jawa Timur (79,90), Sumatera Barat (78,64), Kalimantan Timur (78,24) dan DKI Jakarta (77,97). Sedangkan lima provinsi dengan urutan skor terendah yaitu Papua (34,79) atau sangat rawan pangan merupakan prioritas 1, Papua Barat (49,40) atau rawan pangan merupakan prioritas 2, serta Maluku (58,15), Kepulauan Riau (62,70) dan Maluku Utara (63,12) dalam katagori agak tahan pangan merupakan prioritas 4. Peringkat dan skor IKP provinsi tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 4.2.1.

Tabel 4.2.1. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi, 2019 - 2020

Peringkat	2019		2020	
	Provinsi	Skor	Provinsi	Skor
1	Bali	85,15	Bali	84,54
2	DI Yogyakarta	83,63	Jawa Tengah	82,31
3	Sulawesi Utara	81,44	Sulawesi Selatan	81,81
4	Jawa Tengah	78,85	DI Yogyakarta	80,67
5	Sulawesi Selatan	78,69	Gorontalo	80,40
6	Sulawesi Tenggara	76,99	Kalimantan Selatan	80,04
7	Kalimantan Timur	76,90	Jawa Timur	79,90
8	Jawa Barat	76,44	Sumatera Barat	78,64
9	Sumatera Barat	75,43	Kalimantan Timur	78,24
10	Kalimantan Selatan	74,71	DKI Jakarta	77,97
:				
33	Papua Barat	30,12	Papua Barat	49,40
34	Papua	25,13	Papua	34,79

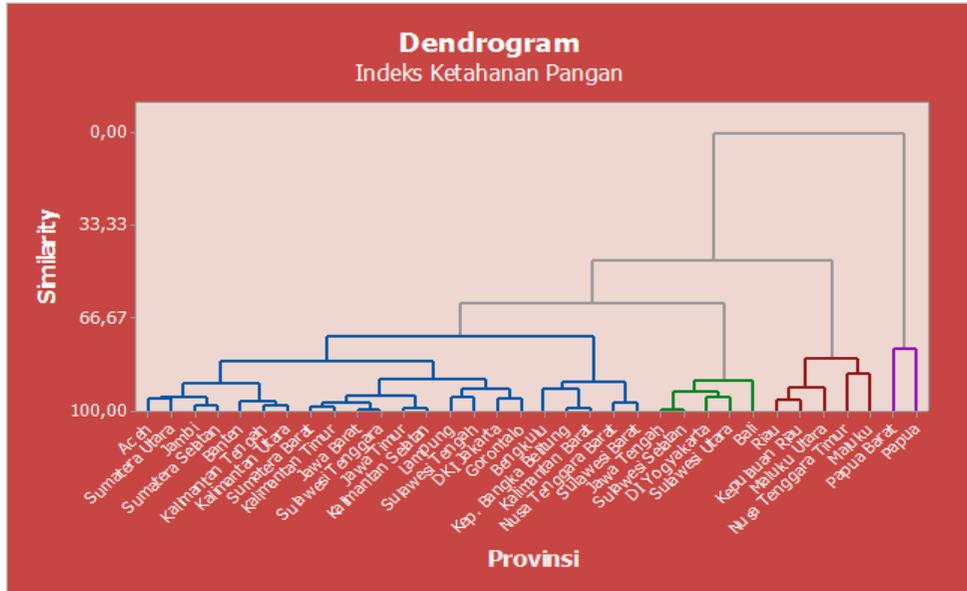
Sumber : BKP

Bila dicermati skor IKP provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2019-2020 makin membaik meskipun merupakan pencilan bawah untuk wilayah provinsi, dengan skor tahun 2019 semula keduanya berdekatan, namun Papua Barat mengalami peningkatan skor IKP yang lebih cepat sehingga tahun 2020 menjadi 49,4 dengan katagori rawan pangan, sementara Papua 34,79 dengan katagori sangat rawan pangan (Gambar 4.2.1).



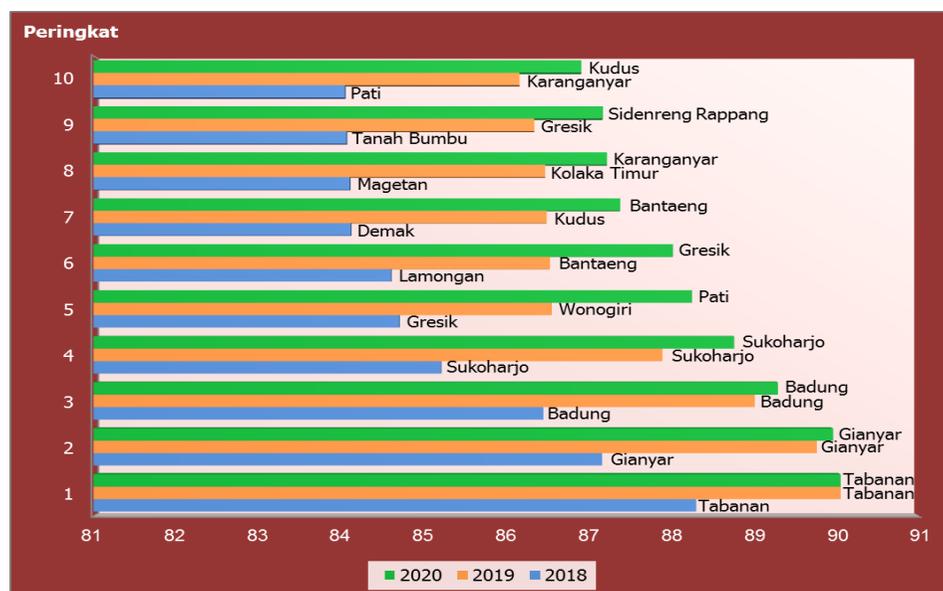
Gambar 4.2.1. Boxplot Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi, 2019-2020

Hasil pengelompokan provinsi berdasarkan skor indeks ketahanan pangan 2019-2020, terdapat 4 (empat) kelompok, yaitu kelompok 1 atau skor IKP tinggi terdapat di 5 (lima) provinsi, kelompok 2 atau skor IKP sedang terdapat di 22 provinsi, kelompok 3 atau skor IKP rendah terdapat di 5 (lima) provinsi dan kelompok 4 atau skor IKP sangat rendah terdapat di 2 (dua) provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Secara rinci provinsi masing-masing kelompok dapat dilihat pada Gambar 4.2.2.



Gambar 4.2.2. Pengelompokan Provinsi Berdasarkan Skor Indeks Ketahanan Pangan, 2019 - 2020

Sementara untuk wilayah kabupaten, terdapat sepuluh kabupaten dengan urutan skor terbaik tahun 2020 adalah Tabanan (90,05), Gianyar (89,96) dan Badung (89,29) di Provinsi Bali, Sukoharjo (88,76) , Pati (88,25), Karangayar (87,22) dan Kudus (86,91) di Provinsi Jawa Tengah, Gresik (88,02) Provinsi Jawa Timur, Bantaeng (87,38) dan Sidenreng Rappang (87,17) Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan dua kabupaten dengan urutan skor terendah berada di Kabupaten Puncak (12,63) dan Dogiyai (14,70) keduanya dalam katagori sangat rentan dan dari 416 kabupaten terdapat 26 kabupaten dengan katagori sangat rawan pangan atau merupakan prioritas pertama dalam pemberian bantuan sosial. Peringkat dan skor IKP kabupaten tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 4.2.2 Gambar 4.2.3.



Gambar 4.2.3. Sepuluh Peringkat Pertama dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten, 2018 - 2020

Tabel 4.2.2. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten, 2018 - 2020

Peringkat	2018		2019		2020	
	Kabupaten	Skor	Kabupaten	Skor	Kabupaten	Skor
1	Tabanan	88,30	Tabanan	90,05	Tabanan	90,05
2	Gianyar	87,16	Gianyar	89,76	Gianyar	89,96
3	Badung	86,45	Badung	89,01	Badung	89,29
4	Sukoharjo	85,21	Sukoharjo	87,89	Sukoharjo	88,76
5	Gresik	84,70	Wonogiri	86,55	Pati	88,25
6	Lamongan	84,60	Bantaeng	86,53	Gresik	88,02
7	Demak	84,11	Kudus	86,49	Bantaeng	87,38
8	Magetan	84,10	Kolaka Timur	86,47	Karanganyar	87,22
9	Tanah Bumbu	84,06	Gresik	86,34	Sidenreng Rappang	87,17
10	Pati	84,04	Karanganyar	86,16	Kudus	86,91
:						
415	Intan Jaya	7,81	Puncak	12,26	Dogiyai	14,70
416	Nduga	7,38	Nduga	10,56	Puncak	12,63

Sumber : BKP

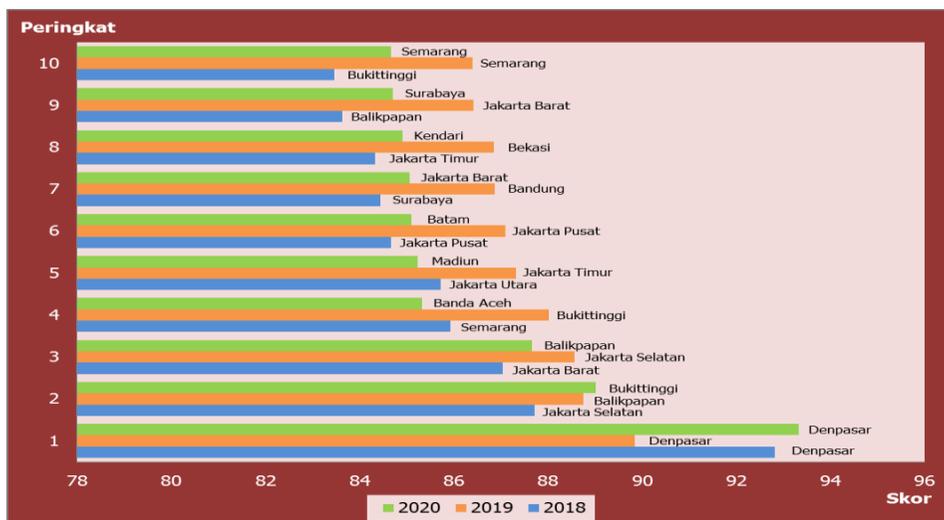
Selanjutnya untuk wilayah perkotaan, Sepuluh kota dengan urutan skor terbaik tahun 2020 adalah Denpasar (93,32), Bukit Tinggi (89,01), Balikpapan (88,74), Banda Aceh (85,32), Madiun (85,23), Batam (85,09), Jakarta Barat (85,06), Kendari (84,91), Surabaya (84,71), dan Semarang (84,66). Sedangkan lima kota dengan urutan skor terendah yaitu

Subulussalam (24,53) atau sangat rawan pangan, Tual (34,80) atau rawan pangan, Pagar Alam (41,62) dan Gunung Sitoli (49,53) dengan katagori agak rawan pangan serta Tanjung Balai (53,21) atau agak tahan pangan. Peringkat dan IKP wilayah perkotaan dapat dilihat pada Tabel 4.2.3 dan Gambar 4.2.4.

Tabel 4.2.3. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota, 2018 -2020

Peringkat	2018		2019		2020	
	Kota	Skor	Kota	Skor	Kota	Skor
1	Denpasar	92,81	Denpasar	89,84	Denpasar	93,32
2	Jakarta Selatan	87,72	Balikpapan	88,74	Bukittinggi	89,01
3	Jakarta Barat	87,03	Jakarta Selatan	88,56	Balkpapan	87,66
4	Semarang	85,93	Bukittinggi	88,02	Banda Aceh	85,32
5	Jakarta Utara	85,71	Jakarta Timur	87,31	Madiun	85,23
6	Jakarta Pusat	84,66	Jakarta Pusat	87,10	Batam	85,09
7	Surabaya	84,44	Bandung	86,87	Jakarta Barat	85,06
8	Jakarta Timur	84,33	Bekasi	86,85	Kendari	84,91
9	Balikpapan	83,62	Jakarta Barat	86,42	Surabaya	84,71
10	Bukittinggi	83,45	Semarang	86,40	Semarang	84,66
:						
97	Tual	24,44	Gunung Sitoli	37,46	Tual	34,80
98	Subulussalam	21,50	Subulussalam	17,40	Subulussalam	24,53

Sumber : BKP



Gambar 4.2.4. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota, 2018 - 2020

4.3. Global Food Security Index (GFSI)

Berdasarkan *Global food security index (GFSI)* yang bersumber dari *The Economist Intelligence Unit (EIU)* New York dan dirilis setiap September. Indeks ketahanan pangan global disusun dari empat aspek yaitu aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan akses pangan, kualitas dan keamanan pangan, serta sumber daya alam dan ketahanannya. Indeks ini dibangun dari 34 indikator unik pada keempat aspek yang mengukur pendorong (*drivers*) ketahanan pangan negara berkembang dan maju. *GFSI* menyajikan peringkat dan skor indeks ketahanan pangan di 113 negara di dunia. Skor indeks ketahanan pangan berkisar antara 0 – 100, semakin mendekati 100 maka ketahanan pangannya semakin kuat

Selama tahun 2018 - 2021, peringkat terbaik indeks ketahanan pangan Indonesia berdasarkan GFSI pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-57 diantara 113 negara – negara di dunia dengan skor indeks ketahanan pangan sebesar 62,4. Namun pada tahun 2021, peringkat Indonesia menurun ke peringkat 69 dengan skor indeks ketahanan pangan yang juga menurun menjadi 59,2. Penurunan peringkat di tahun 2021 tersebut diakibatkan oleh penurunan di tiga indikator indeks ketahanan pangan, utamanya disebabkan penurunan peringkat dan skor keterjangkauan akses pangan yang cukup besar. Peringkat keterjangkauan akses pangan menurun empat poin ke urutan 54 dengan skor 74,9. Penurunan tersebut kemungkinan akibat dari menurunnya daya beli masyarakat dampak pandemi covid-19 sehingga kemampuan untuk menjangkau akses pangan juga terdampak. Indikator selanjutnya yang juga menurun adalah kualitas dan keamanan pangan, skor tahun 2021 sebesar 48,5 turun dibandingkan tahun 2020 sebesar 49,5 atau secara peringkat turun dari peringkat 91 ke 95.

Indikator ketersediaan pangan pada tahun 2021 juga menurun hingga sembilan poin menjadi peringkat 37 dengan skor 63,7 sedangkan

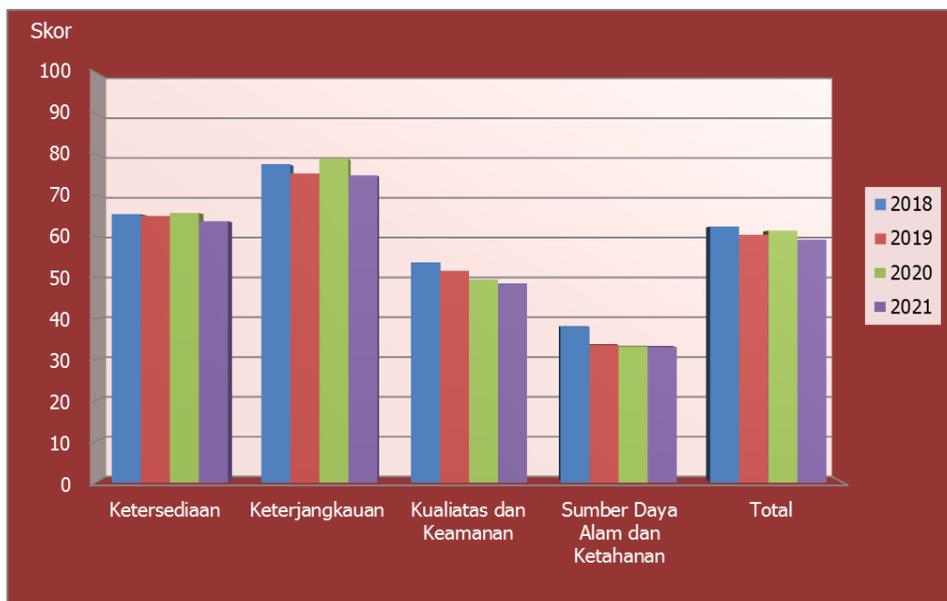
tahun 2020 berada di peringkat 28 atau skor sebesar 65,7. Untuk meningkatkan skor ketersediaan pangan ditahun-tahun berikutnya, dapat dilakukan dengan melakukan diversifikasi bahan pangan. Salah satunya adalah mengubah ketergantungan masyarakat akan komoditas beras menjadi komoditas pengganti lainnya seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung atau sagu. Selanjutnya adalah indikator sumber daya alam dan ketahanannya yang berada pada peringkat terakhir atau ke-113 di dunia selama tahun terakhir. Tahun 2021 skornya sebesar 33,0 sedangkan tahun 2020 sebesar 33,1. Salah satu upaya untuk meningkatkan skor indikator ini yaitu dengan memperbaiki dan memperbarui ekosistem pangan yang rusak. Saat ini, Kementerian Pertanian telah melakukan program penyediaan pangan rakyat dalam skala besar, penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah untuk kawasan sentra produksi serta pembangunan sistem logistik, pengolahan dan nilai tambah, distribusi dan pemasaran berbasis digital. Program tersebut dikenal dengan *food estate* yang dikembangkan di beberapa wilayah di Indonesia. Secara rinci peringkat dan skor indeks ketahanan pangan Indonesia berdasarkan *Global Food Security Index* tahun 2018 sampai 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.3.1 dan Gambar 4.3.1.

Tabel 4.3.1. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Indonesia berdasarkan *Global Food Security Index*, 2018 – 2021

Tahun	Ketersediaan		Keterjangkauan		Kualitas dan Keamanan		Sumber Daya Alam dan Ketahanan		Total	
	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor
2018	32	65,4	54	77,6	86	53,7	106	37,9	57	62,4
2019	34	65,0	56	75,3	87	51,6	112	33,5	62	60,4
2020	28	65,7	50	79,0	91	49,5	113	33,1	57	61,4
2021	37	63,7	54	74,9	95	48,5	113	33,0	69	59,2

Sumber : *Global Food Security Index*

Keterangan: Download per Tanggal 23 November 2021



Gambar 4.3.1. Skor Indeks Ketahanan Pangan Indonesia berdasarkan *Global Food Security Index, 2018 – 2021*

Selanjutnya bila dilihat perkembangan GFSI negara-negara di dunia, Irlandia merupakan negara dengan skor indeks ketahanan pangan tertinggi atau peringkat pertama di dunia dengan skor selama tahun 2018 – 2021 berkisar antara 84,0 sampai 84,8. Irlandia mampu menggeser peringkat Finlandia yang sebelumnya menempati posisi pertama sebagai negara dengan indeks ketahanan pangan tertinggi di dunia. Selanjutnya peringkat kedua yaitu Austria dengan skor indeks ketahanan pangan tahun 2021 sebesar 81,3. Skor tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yang skornya sebesar 80,1. Peningkatan skor tersebut membuat peringkat Austria meningkat empat poin dibandingkan tahun 2020. Peringkat berikutnya secara berurutan ditempati oleh Inggris dengan skor tahun 2021 sebesar 81,0; Finlandia (80,9); Swiss (80,4); Belanda (79,9); Kanada (79,8); Jepang (79,3) serta Prancis dan Amerika Serikat yang mendapatkan skor sama yaitu 79,1. Terlihat bahwa sebagian besar negara yang berada pada 10 besar dengan nilai indeks ketahanan tertinggi adalah negara – negara yang ada di Eropa. Salah satu faktor yang menyebabkan

banyak negara di Eropa yang masuk peringkat 10 besar adalah besarnya tingkat pendapatan nasionalnya. Negara di Benua Asia hanya Jepang yang termasuk pada peringkat 10 besar sedangkan Benua Amerika diwakili oleh Kanada dan Amerika Serikat.

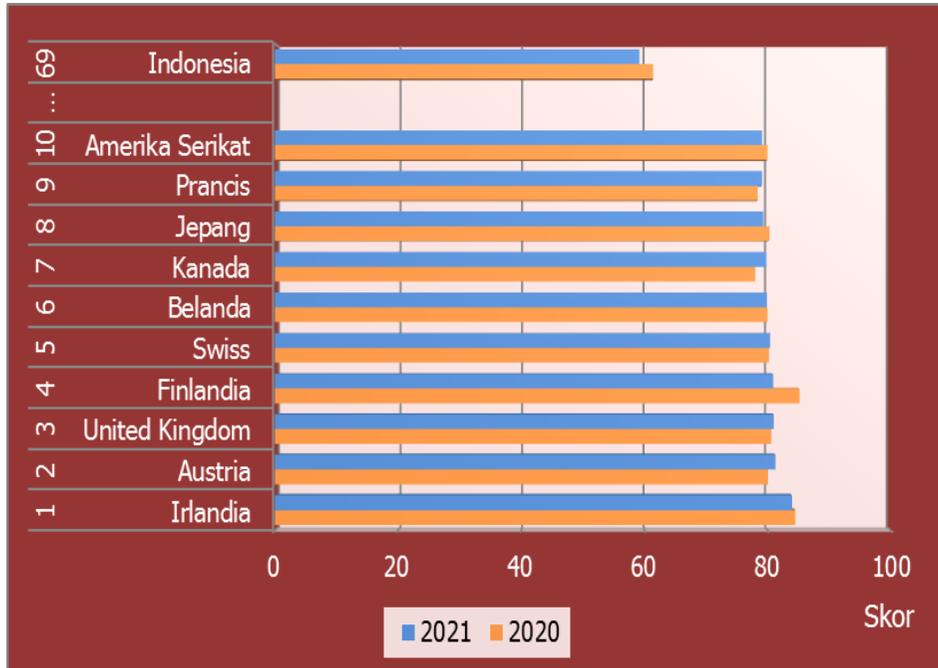
Tahun 2021, Indonesia berada pada peringkat 69 dunia dengan skor indeks ketahanan pangan sebesar 59,2 dan turun 12 peringkat dibandingkan tahun 2020. Selama empat tahun terakhir, skor indeks ketahanan pangan Indonesia tertinggi diperoleh pada tahun 2018 yaitu sebesar 62,4 sedangkan tahun - tahun berikutnya semakin menurun. Secara rinci peringkat dan skor indeks ketahanan pangan negara di dunia dapat dilihat pada Tabel 4.3.2 dan Gambar 4.3.2.

Tabel 4.3.2. Indeks Ketahanan Pangan Negara di Dunia, 2018 - 2021

Peringkat	Negara	Indeks Ketahanan Pangan Global				Pertumbuhan 2020-2021
		2018	2019	2020	2021	
1	Irlandia	84,8	84,7	84,5	84,0	▲1
2	Austria	78,7	79,2	80,1	81,3	▲4
3	Inggris	79,3	80,6	80,6	81,0	↔
4	Finlandia	83,9	84,5	85,2	80,9	▼3
5	Swiss	81,1	79,7	80,2	80,4	↔
6	Belanda	81,0	81,2	80,0	79,9	▲1
7	Kanada	75,6	77,8	78,0	79,8	▲9
8	Jepang	79,8	79,8	80,3	79,3	▼4
9	Prancis	79,6	78,5	78,4	79,1	▲3
10	Amerika Serikat	79,5	79,3	80,0	79,1	▼2
:						
69	Indonesia	62,4	60,4	61,4	59,2	▼12

Sumber : *Global Food Security Index*

Keterangan : Download per Tanggal 23 November 2021



Gambar 4.3.2. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Negara di Dunia, 2020 -2021

Sementara dilihat lebih rinci per aspek penyusun GFSI, Irlandia sebagai negara tertinggi skor nilai GFSI memperoleh nilai tertinggi pada aspek kualitas dan keamanan pangan dengan skor 94,0 dan merupakan urutan ketiga, sedangkan peringkat pertama dan kedua diduduki oleh Kanada dan Amerika Serikat dengan skor masing-masing sebesar 94,5 dan 94,3. Sedangkan Indonesia berada pada peringkat 95 dengan skor sebesar 48,5. Negara yang berada pada peringkat terakhir adalah Mozambik dengan skor 33,8 (Tabel 4.3.3). Aspek kualitas dan keamanan pangan sangat terkait dengan kelaparan (menggunakan kekurangan gizi sebagai ukuran) dan *stunting* pada anak-anak. Populasi dengan pola makan yang kurang berkualitas protein dan mikronutriennya dan akses air bersih yang terbatas memperoleh skor yang rendah.

Tabel 4.3.3. *Global Food Security Index* Negara di Dunia, 2021

Peringkat	Negara	Indeks				Skor Keseluruhan	Pertumbuhan 2020-2021
		Keterjangkauan	Ketersediaan	Kualitas dan Keamanan	Sumber Daya Alam dan Ketahanan		
1	Irlandia	92,9	75,1	94,0	74,1	84,0	▲1
2	Austria	90,5	75,2	91,2	65,7	81,3	▲4
3	Inggris	91,1	72,7	89,6	69,0	81,0	↔
4	Finlandia	91,7	66,2	93,8	75,1	80,9	▼3
5	Swiss	89,0	76,9	86,4	65,1	80,4	↔
6	Belanda	89,7	73,7	92,2	61,2	79,9	▲1
7	Kanada	87,6	77,7	94,5	54,4	79,8	▲9
8	Jepang	90,0	75,7	83,4	61,9	79,3	▼4
9	Prancis	90,3	67,0	92,1	67,5	79,1	▲3
10	Amerika Serikat	88,7	71,0	94,3	61,3	79,1	▼2
:							
69	Indonesia	74,9	63,7	48,5	33,0	59,2	▼12
:							
112	Yemen	39,3	27,6	37,4	42,1	35,7	▲1
113	Burundi	24,0	33,7	45,7	44,8	34,7	▼6

Sumber: Website Global Food Security Index

Ket : Download per Tanggal 23 November 2021

Aspek selanjutnya adalah keterjangkauan, yang juga sangat berhubungan dengan kelaparan. Negara – negara yang program pengamanan pangan nasional yang tidak komprehensif dan tidak didanai dengan baik memiliki tingkat kelaparan yang lebih tinggi. Ditambah dengan ketergantungan yang lebih besar pada bantuan pangan. Negara yang memiliki skor indeks keterjangkauan terbesar adalah Denmark dengan skor 93,1 kemudian disusul Irlandia di peringkat kedua yang memperoleh skor sebesar 92,9. Peringkat selanjutnya ditempati Finlandia (91,7), Inggris (91,1), Swedia (91,0) dan Selandia Baru (90,9). Indonesia berada di peringkat 54 dengan skor 74,9. Negara yang memiliki skor indeks keterjangkauan terendah adalah Malawi dengan skor 23,6. Hal yang dapat mempengaruhi skor keterjangkauan diantaranya volatilitas harga pangan yang besar dan kenaikan biaya.

Negara yang menempati peringkat teratas dengan skor indeks ketersediaan tertinggi adalah Singapura dengan skor 82,9. Selanjutnya adalah Cina dengan skor 78,4. Walaupun skor keseluruhan tidak menempatkan Singapura sebagai negara pada peringkat sepuluh besar namun skor indeks ketersediaannya mampu menempati peringkat pertama di dunia. Negara – negara yang mampu menyediakan komoditas pangan untuk dikonsumsi penduduknya dengan baik memperoleh skor lebih tinggi. Negara yang berada pada peringkat selanjutnya adalah Kanada (77,7), Swiss (76,9), Jepang (75,27), serta Austria dan Israel yang memperoleh skor sama yaitu 75,2. Indeks ketersediaan Irlandia berada pada peringkat kedelapan dengan skor sebesar 75,1. Peringkat indeks ketersediaan Indonesia juga cukup bagus dibandingkan indeks lainnya yaitu peringkat 37 dengan skor 63,7. Peringkat terakhir adalah Venezuela dengan skor sebesar 27,1.

Aspek keempat adalah sumber daya alam dan ketahanannya. Skor tertinggi sebesar 76,1 diperoleh oleh Norwegia. Peringkat kedua adalah Finlandia dengan skor 75,1 kemudian disusul Irlandia dengan skor 74,1. Peringkat empat dan lima adalah Republik Ceko (70,9) dan Selandia Baru (70,8). Indonesia memperoleh skor sebesar 33,0 dan berada di peringkat 113 atau terakhir pada indeks ini. Faktor yang sangat mempengaruhi indeks ini untuk saat ini adalah perubahan iklim dan kerusakan alam.

Sementara bila dilihat pada kawasan Asia Pasifik yang mencakup 23 negara, Peringkat indeks teratas adalah negara Jepang dengan skor sebesar 79,3 di tahun 2021. Sebagai negara dengan skor indeks ketahanan pangan terbesar di Asia Pasifik, Jepang juga termasuk kedalam sepuluh negara teratas di dunia yaitu menempati urutan ke-8. Dari tahun 2018 sampai dengan 2021, Jepang mempertahankan peringkatnya pada urutan pertama negara dengan ketahanan pangan yang kuat di Asia Pasifik. Peringkat kedua ditempati oleh Singapura dengan skor tahun 2021 sebesar

77,4. Negara – negara selanjutnya yang berada pada peringkat 10 besar adalah Selandia Baru dengan skor tahun 2021 sebesar 76,8; Australia (71,6); Korea Selatan (71,6), Cina (71,3); Malaysia (70,1); Kazakhstan (69,2); Thailand (64,5); dan Azerbaijan (62,6). Terdapat tiga negara di Asia Tenggara yang berada pada peringkat 10 besar negara dengan skor indeks ketahanan pangan terbesar di Asia Pasifik yaitu Singapura, Malaysia dan Thailand. Indonesia berada pada peringkat ke-13 ditahun 2021 dan turun satu peringkat dibandingkan tahun 2020. Skor indeks ketahanan pangan Indonesia menurun dari 61,4 menjadi 59,2. Selanjutnya negara di Asia Pasifik yang menempati urutan terakhir berdasarkan angka indeks ketahanan pangan tahun 2021 adalah Laos dengan skor 46,4 (Tabel 4.3.4).

Tabel 4.3.4. Indeks Ketahanan Pangan Negara di Asia Pasifik, 2018 - 2021

Peringkat	Negara	Indeks Ketahanan Pangan Global			
		2018	2019	2020	2021
1	Jepang	79,8	79,8	80,3	79,3
2	Singapura	76,1	78,4	78,3	77,4
3	Selandia Baru	77,3	78,2	77,7	76,8
4	Australia	78,1	75,9	73,9	71,6
5	Korea Selatan	73,1	72,3	73,4	71,6
6	Cina	72,6	74,4	70,9	71,3
7	Malaysia	64,1	66,8	65,0	70,1
8	Kazakhstan	65,1	69,9	71,9	69,2
9	Thailand	63,7	63,8	63,6	64,5
10	Azerbaijan	58,8	61,9	61,5	62,6
:					
13	Indonesia	62,4	60,4	61,4	59,2
:					
23	Laos	52,5	49,5	51,0	46,4

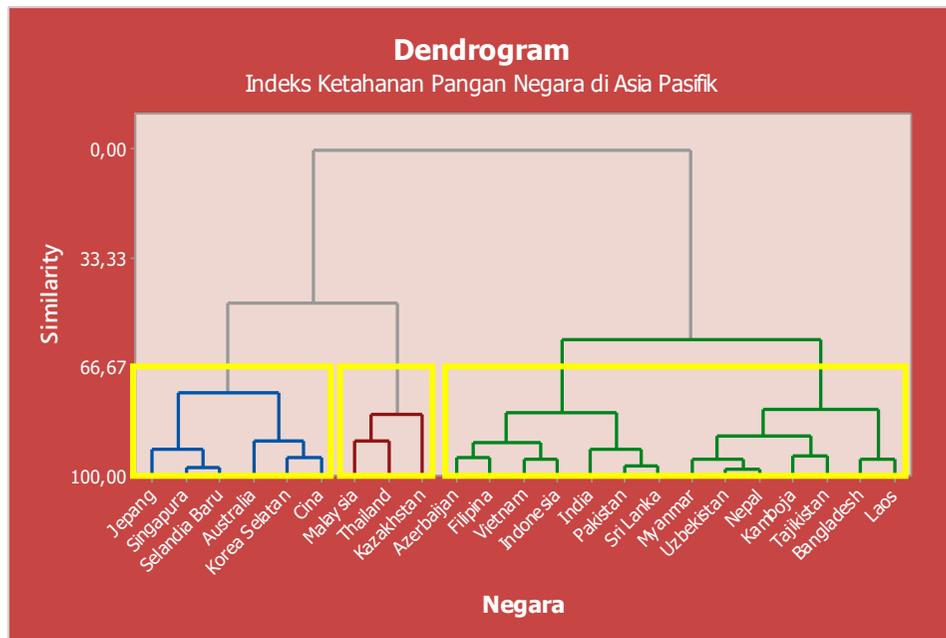
Sumber : *Global Food Security Index*

Keterangan : Download per Tanggal 23 November 2021

Peringkat berdasarkan tahun 2021

Jika indeks ketahanan pangan negara – negara di Asia Pasifik dikelompokan menjadi 3 berdasarkan kemiripannya, maka diperoleh pengelompokan sebagai berikut yaitu kelompok 1 terdiri dari enam negara,

kelompok 2 terdiri tiga negara dan kelompok 3 terdiri empat belas negara. Negara yang termasuk pada kelompok 1 atau negara dengan skor indeks ketahanan pangan tinggi antara lain Jepang, Singapura, Selandia Baru, Australia, Korea Selatan dan Cina. Kelompok 2 atau negara dengan skor indeks ketahanan pangan sedang terdiri dari Malaysia, Thailand dan Kazakhstan. Kemudian kelompok 3 atau negara dengan skor ketahanan pangan rendah terdiri dari Azerbaijan, Filipina, Vietnam, Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Uzbekistan, Nepal, Kamboja, Tajikistan, Bangladesh dan Laos (Gambar 4.3.3).



Gambar 4.3.3. Pengelompokan Indeks Ketahanan Pangan Global Negara di Asia Pasifik, 2018 – 2021

Secara keseluruhan, negara di Asia Pasifik yang memiliki skor tertinggi adalah Jepang (79,3). Jika dilihat dari per aspek penyusun GFSI, menunjukkan untuk aspek keterjangkauan, posisi Jepang berada di bawah Selandia Baru dengan skor 90,0 sedangkan Selandia Baru skor 90,9. Peringkat selanjutnya adalah Singapura (87,9), Malaysia (85,6), Australia

(84,9), Kazakhtan (83,0) dan Azerbaijan (82,3). Indonesia berada peringkat 11 dengan skor 74,9.

Pada aspek ketersediaan di Asia Pasifik, peringkat pertama ditempati Singapura dengan skor 82,9. Selanjutnya Cina (78,4), Jepang (75,7), Korea Selatan (69,7), dan India (65,7). Indonesia berada pada urutan kesembilan dengan skor sebesar 63,7 dan untuk di kawasan Asia Tenggara, skor indeks ketersediaan Indonesia berada pada peringkat ketiga setelah Singapura dan Malaysia (Tabel 4.3.5).

Tabel 4.3.5. *Global Food Security Index* Negara di Asia Pasifik, 2021

Peringkat	Negara	Indeks				Skor Keseluruhan
		Keterjangkauan	Ketersediaan	Kualitas dan Keamanan	Sumber Daya Alam dan Ketahanan	
1	Jepang	90,0	75,7	83,4	61,9	79,3
2	Singapura	87,9	82,9	79,1	46,7	77,4
3	Selandia Baru	90,9	63,2	82,0	70,8	76,8
4	Australia	84,9	64,1	87,8	44,7	71,6
5	Korea Selatan	80,3	69,7	78,5	52,2	71,6
6	Cina	77,4	78,4	71,4	47,2	71,3
7	Malaysia	85,6	64,0	76,3	46,6	70,1
8	Kazakhstan	83,0	58,5	81,0	51,9	69,2
9	Thailand	81,8	57,3	59,5	50,8	64,5
10	Azerbaijan	82,3	58,0	59,1	38,2	62,6
:						
13	Indonesia	74,9	63,7	48,5	33,0	59,2
:						
23	Laos	47,7	46,1	49,2	42,0	46,4

Sumber: Website Global Food Security Index

Ket : Download per Tanggal 23 November 2021

Peringkat pertama untuk aspek kualitas dan keamanan pangan ditempati oleh Australia dengan skor 87,8. Peringkat selanjutnya adalah Jepang (83,4), Selandia Baru (82,0), Kazakhstan (81,0), Singapura (79,1) dan Korea Selatan (78,5). Sedangkan Indonesia berada di peringkat tiga terbawah atau peringkat 21, memperoleh skor sebesar 48,5. Peringkat Indonesia diatas Bangladesh dan Kamboja (peringkat terakhir).

Untuk aspek sumber daya alam dan ketahanannya Indonesia berada pada peringkat 23 atau terakhir di Asia Pasifik dengan skor sebesar 33,0. Indonesia berada dibawah Azerbaijan dan Bangladesh yang masing –

masing memperoleh skor 38,2 dan 36,8. Sedangkan peringkat pertama di Asia Pasifik adalah Selandia Baru dengan skor 70,8. Upaya yang diperlu dilakukan Indonesia agar bisa memperbaiki skor indeks ini salah satunya dengan memperbarui ekosistem pangan dan upaya untuk memperkecil risiko perubahan iklim.

BAB V. KESIMPULAN

Dari pembahasan analisis di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek ketersediaan mencakup produksi, stok serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Berdasarkan data hasil Kerangka Survei Area (KSA) BPS tahun 2018 sampai 2020, perkembangan luas panen padi di Indonesia tahun 2020 terlihat sedikit menurun 0,19% dibandingkan 2019 menjadi 10,66 juta hektar. Puncak panen padi di Indonesia terjadi pada bulan Maret untuk tahun 2018 dan 2019, namun tahun 2020 bergeser pada bulan April. Selain pada bulan tersebut, puncak panen kedua terjadi pada Agustus dan selanjutnya luas panen makin berkurang sampai awal tahun berikutnya
2. Berdasarkan rata-rata produksi padi 2018-2020 sekitar 87% produksi padi Indonesia berada di 12 (duabelas) provinsi, kontribusi 52% disumbang dari 3 (tiga) Provinsi di Jawa yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing menyumbang 17,65%, 17,6% dan 16,49%. Provinsi berikutnya adalah Sulawesi Selatan dengan kontribusi 9,33%, disusul oleh provinsi Sumatera Selatan (4,95%), Lampung (4,34%), sementara provinsi sentra selanjutnya Sumatera Utara, Aceh, Banten, Sumatera Barat, NTB dan Kalimantan Selatan dengan kontribusi kurang dari 4%.
3. Stok pangan merupakan jumlah pangan yang disimpan sebagai cadangan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Sebaran stok beras akhir Oktober 2021 (BKP) sebesar 8,36 juta ton dengan sebaran 53.17% berada di rumah tangga (produsen dan konsumen), disusul kemudian di penggilingan sebesar 17,89 %, di Bulog 15,04 %, di pedagang 9,06 %, di hotel, restoran dan catering (horeka) 4,26% , di PIBC 0,44% dan 0,15% di LPM (Lumbung Pangan Masyarakat). (Gambar 3.1.4). Stok beras di rumah tangga utamanya di rumah

tangga produsen atau petani mencapai 93%. Sebaran stok pangan lainnya meliputi jagung, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, gula pasir, daging sapi, telur, dan daging ayam, utamanya berada di pedagang yaitu pedagang pengumpul, grosir, agen dan distributor, kecuali jagung di pabrik pakan sekitar 36%.

4. Sejalan dengan uraian di atas, terlihat produksi beras dalam negeri kaitannya dengan kebutuhan beras untuk memenuhi konsumsi beras masyarakat yang dihitung berdasarkan nilai *Self Sufficiency Ratio (SSR)* tahun 2019-2020 mendekati 99% yang berarti sebagian besar kebutuhan beras Indonesia dapat dipenuhi oleh produksi domestik atau Indonesia telah mencapai swasembada beras, dan sebaliknya *Import Dependency Ratio (IDR)* sangat kecil 1,01%.
5. Sementara IDR dan SSR untuk komoditas pangan lainnya tahun 2018-2020, terdapat 2 (dua) komoditas pangan utama yang memiliki nilai ketergantungan impor (IDR) relatif tinggi sekitar 73% - 90% yaitu kedelai dan gula yang digunakan untuk bahan baku industri, sedangkan ketergantungan terhadap daging sapi impor sekitar 25-29 Sementara pemenuhan kebutuhan komoditas seperti jagung (utama sebagai bahan pakan ternak), cabe, bawang merah, daging ayam dan telur ayam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri yang ditunjukkan dari nilai SSR mendekati 100%.
6. Selanjutnya aspek keterjangkaun, berdasarkan data Susenas BPS pengeluaran untuk bahan makanan di wilayah perkotaan dan perdesaan Indonesia tahun 2020 sekitar 49,22% dari total pengeluaran per kapita dalam sebulan Rp 603.236,- Pengeluaran ini meningkat 5,36% dari tahun 2019.
7. Pengeluaran untuk makanan di wilayah perkotaan cenderung merata untuk semua bahan makanan, sementara di perdesaan pengeluaran untuk makanan cenderung mengelompok menjadi 3 yaitu kelompok

atas untuk padi-padian dan rokok, kelompok tengah untuk ikan dan sayuran, dan kelompok bawah untuk daging, telur susu dan buah-buahan.

8. DKI Jakarta dan DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan persentase pengeluaran untuk makanan paling rendah sekitar 41% dari total pengeluaran, sebaliknya Nusa Tenggara Timur, Papua dan Aceh merupakan provinsi dengan persentase pengeluaran untuk makanan paling tinggi sekitar 55%. Namun dari sisi nilai pengeluaran untuk makanan, DKI Jakarta merupakan provinsi tertinggi pengeluaran per kapita sebulan tahun 2020 Rp. 944.687,- atau naik 7,65% dibandingkan tahun 2019 dan terendah di provinsi Nusa Tenggara Timur Rp. 442.700,- atau naik 3,08% dibandingkan tahun 2019.
9. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2020 naik 5,09% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 26,42 juta orang. Kenaikan ini dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi, serta pendapatan sebagian besar masyarakat menurun. Namun bila dibandingkan tahun 2016, jumlah penduduk miskin cenderung turun dari tahun ke tahun, tahun 2016 jumlahnya mencapai 28,01 juta orang, tahun 2017 menjadi 27,77 juta orang dan pada 2018 menjadi 25,95 juta orang.
10. Dampak pandemi Covid-19 lebih dirasakan oleh penduduk miskin di perkotaan ketimbang pedesaan. Hal ini terlihat dari persentase penduduk miskin di perkotaan naik sebesar 10,31% dibandingkan 2019, sedangkan penduduk miskin di pedesaan hanya naik 0,60%.
11. Aspek kualitas dan keamanan pangan, salah satunya dicerminkan dari tingkat konsumsi energi dan protein penduduk Indonesia tahun 2018 sd 2020 telah melebihi standar ideal, konsumsi energi tahun 2020 sebesar 2.112 Kkal/kap/hari (100,57%) dan konsumsi protein 61,98 gram/kap/hari (108,74%). Namun masih terdapat beberapa provinsi

dengan tingkat konsumsi energi atau protein di bawah standar, tahun 2020 terdapat 19 (sembilanbelas) provinsi dengan rata-rata konsumsi energi di bawah standar dan 7 (tujuh) provinsi dengan rata-rata konsumsi protein dibawah standar.

12. Pola konsumsi pangan masih belum beragam dan bergizi seimbang, dilihat dari belum tercapainya skor PPH ideal 100. Skor PPH tahun 2019 sebesar 87,9 menurun menjadi 86,3 pada tahun 2020 . Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan konsumsi energi dari lima kelompok pangan PPH, kecuali konsumsi kelompok pangan hewani serta minyak dan lemak masing-masing meningkat 1,5% dan 2,7%.
13. Berdasarkan data *Prevalence of Undernourishment (PoU)* tahun 2018-2020 yang bersumber dari BPS, menunjukkan proporsi penduduk yang kekurangan konsumsi pangan di Indonesai berfluktuatif yaitu tahun 2018 sebesar 7,92 % turun menjadi 7,63% di tahun 2019 dan kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 8,34%. Peningkatan PoU pada tahun 2020 sejalan dengan peningkatan kemiskinan, sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19.
14. Sementara berdasarkan perkembangan kerawanan pangan sedang atau berat (*FIES-Food Insecurity Experienced Scale*) di Indonesia tahun 2018-2020, menunjukan tren penurunan yang berarti persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan guna mencukupi kebutuhan enegi sehari-hari makin berkurang, yaitu tahun 2018 sebesar 6,86% kemudian menurun hingga tahun 2020 menjadi 5,12%.
15. Berdasarkan prognosa neraca beras tahun 2021 *update* data per 26 Oktober 2021. Perkiraan penyediaan beras Indonesia berasal dari perkiraan produksi GKG Januari - Desember KSA BPS sebesar 55,27 juta ton dengan total perkiraan produksi beras 31.65 juta ton. Sementara perkiraan total kebutuhan beras 2021 sebesar 29,66 juta

ton yang terdiri dari konsumsi langsung dalam rumah tangga sebesar 21,5 juta ton dan konsumsi di luar rumah tangga sebesar 8,16 juta ton. Sehingga tahun 2021 diperkirakan terjadi surplus sebesar 1,99 juta ton, dengan adanya stok akhir Desember 2020 sebesar 7,39 juta ton maka neraca beras kumulatif sd Desember 2021 menjadi 9,38 juta ton.

16. Neraca penyediaan dan kebutuhan komoditas lainnya seperti jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, gula, minyak goreng, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan telur ayam ras selama tahun 2021 terlihat mengalami surplus artinya ketersediaan secara nasional aman namun distribusi dan akses untuk sampai ke masyarakat yang harus diperhatikan.
17. Secara umum wilayah Indonesia bagian barat memiliki Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia bagian timur. Sepuluh provinsi dengan urutan skor terbaik tahun 2020 adalah Bali (84,54), Jawa Tengah (82,31), Sulawesi Selatan (81,81), DI.Yogyakarta (80,67), Gorontalo (80,40), Kalimantan Selatan (80,04), Jawa Timur (79,90), Sumatera Barat (78,64), Kalimantan Timur (78,24) dan DKI Jakarta (77,97). Sedangkan lima provinsi dengan skor terendah yaitu Papua (34,79) atau sangat rawan pangan merupakan prioritas 1, Papua Barat (49,40) atau rawan pangan merupakan prioritas 2, Maluku (58,15), Kepulauan Riau (62,70) dan Maluku Utara (63,12) dalam katagori agak tahan pangan merupakan prioritas 4
18. Sepuluh wilayah kabupaten dengan urutan skor IKP terbaik tahun 2020 adalah Tabanan (90,05), Gianyar (89,96) dan Badung (89,29) di Provinsi Bali, Sukoharjo (88,76) , Pati (88,25), Karangayar (87,22) dan Kudus (86,91) di Provinsi Jawa Tengah, Gresik (88,02) Provinsi Jawa Timur, Bantaeng (87,38) dan Sidenreng Rappang (87,17) Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan 26 kabupaten dari 416 kabupaten

- merupakan kabupaten dengan katagori sangat rawan pangan atau merupakakn prioritas pertama dalam , dengan skor terendah berada di Kabupaten Puncak (12,63) dan Dogiyai (14,70)
19. Sepuluh wilayah perkotaan dengan urutan skor IKP terbaik tahun 2020 adalah Denpasar (93,32), Bukit Tinggi (89,01), Balikpapan (88,74), Banda Aceh (85,32), Madiun (85,23), Batam (85,09), Jakarta Barat (85,06), Kendari (84,91), Surabaya (84,71), dan Semarang (84,66). Sedangkan lima kota dengan urutan skor terendah yaitu Subulussalam (24,53) atau sangat rawan pangan, Tual (34,80) atau rawan pangan, Pagar Alam (41,62) dan Gunung Sitoli (49,53) dengan katagori agak rawan pangan serta Tanjung Balai (53,21) atau agak tahan pangan.
 20. Selama tahun 2018 - 2021, peringkat terbaik indeks ketahanan pangan Indonesia berdasarkan *GFSI (Global Food Security Index)* pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-57 diantara 113 negara – negara di dunia dengan skor indeks ketahanan pangan sebesar 62,4. Namun pada tahun 2021, turun 12 peringkat menjadi 69 dengan skor 59,2 tahun 2020.
 21. Penurunan peringkat di tahun 2021 tersebut diakibatkan oleh penurunan peringkat skor keterjangkauan akses pangan yang cukup besar menurun empat poin ke urutan 54 dengan skor 74,9. Penurunan akibat dari menurunnya daya beli masyarakat dampak pandemi covid-19. Skor kualitas dan keamanan pangan tahun 2021 sebesar 48,5 atau turun dibandingkan tahun 2020 sebesar 49,5 atau secara peringkat turun dari peringkat 91 ke 95. Skor ketersediaan pangan tahun 2021 menurun menjadi 63,7 atau peringkat 37 yang sebelumnya tahun 2020 berada di peringkat 28 dengan skor 65,7. Selanjutnya aspek sumber daya alam dan ketahanannya yang berada pada peringkat terakhir atau ke-113 dengan skor 33,0.

22. Indeks ketahanan pangan negara – negara di Asia Pasifik bila dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan kemiripannya, yaitu kelompok 1 atau IKP tinggi terdiri dari enam negara antara lain Jepang, Singapura, Selandia Baru, Australia, Korea Selatan dan Cina, kelompok 2 atau IKP serta kelompok 3 atau IKP rendah terdiri empat belas negara. yaitu Azerbaijan, Filipina, Vietnam, Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Uzbekistan, Nepal, Kamboja, Tajikistan, Bangladesh dan Laos.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.
- BPS. 2020. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. Jakarta.
- BPS. 2020. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2020. Jakarta
- BPS. 2015. Indeks Ketahanan Pangan. <https://www.bps.go.id/news/2015/05/06/110/indeks-ketahanan-pangan.html> [terhubung berkala]
- Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, 2021. Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan. Jakarta
- Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, 2021. Panduan Prognosa Neraca Pangan Strategis Tahun 2021. Jakarta
- Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, 2020. Indeks Ketahanan Pangan 2020. Jakarta
- Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, 2019. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2019. Jakarta
- Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, 2018. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2018. Jakarta
- Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, 2019. Situasi Ketahanan Pangan dan Gizi Indonesia Tahun 2019. Jakarta
- Darmawan, Dedy. 2020. CIPS: Akses Pangan di Indonesia Sering Luput dari Perhatian. <https://republika.co.id/berita/qlj19c370/cips-akses-pangan-di-indonesia-sering-luput-dari-perhatian> [terhubung berkala]
- <http://database.pertanian.go.id/eksim2012>
- <http://pusatkkp.bkp.pertanian.go.id/simonstok/>
- <http://pusatkkp.bkp.pertanian.go.id/pou/>
- <https://impact.economist.com/>



**PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN
Jl. Harsono RM No. 3 Gd. D Lt. IV Ragunan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7805305, Fax (021) 7805305, 7806385
Homepage : <http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id>**